

**LAPORAN AKHIR**

**PENYUSUNAN PROYEKSI MAKROEKONOMI KOTA  
SURAKARTA (OUTLOOK)**



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**KOTA SURAKARTA**

**TAHUN 2022**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Evaluasi pembangunan daerah sangat penting dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta sebagai dasar dalam menyusun kebijakan dan strategi ke depan. Evaluasi yang dilakukan akan menjadi penentu arah pembangunan Kota Surakarta karena evaluasi memungkinkan pemerintah daerah mampu menganalisis kekuatan dan kelemahan saat ini serta mengkaji peluang dan tantangan yang akan dihadapi dalam rangka menentukan arah pembangunan Kota Surakarta. Kekuatan dan kelemahan yang dihadapi saat ini dapat dikaji menggunakan beberapa indikator penting dan relevan kondisi perekonomian Kota Surakarta, sementara peluang dan tantangan dapat dikaji melalui dinamika perekonomian di luar Kota Surakarta, baik pada level regional, nasional, maupun internasional. Kegiatan evaluasi diperlukan dalam pembangunan daerah dalam rangka mengidentifikasi berbagai permasalahan, peluang, dan tantangan yang akan dijadikan sebagai dasar dalam perumusan kebijakan. Evaluasi juga dimaksudkan untuk melihat capaian kinerja yang telah dilakukan sebelumnya. Dalam PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa setiap daerah menyusun laporan penyelenggaraan pemerintah daerah yang antara lain membuat evaluasi makroekonomi. Di dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 juga disebutkan tentang kewajiban daerah melakukan evaluasi atas capaian kinerjanya. Berbagai peraturan perundangan lain juga menyatakan bahwa kegiatan evaluasi merupakan kegiatan yang wajib dilakukan oleh setiap daerah, misalnya evaluasi pelaksanaan RKPD atau RPJMD. Selain itu, evaluasi juga dapat dilakukan berdasarkan kebutuhan dan tujuan tertentu, misalnya untuk memberikan

informasi tentang perkembangan terbaru kondisi perekonomian Kota Surakarta serta menjadi dasar dalam menyusun proyeksi ke depan.

Informasi tentang kondisi dinamis Kota Surakarta penting bagi masyarakat dan *stakeholders* seperti investor dan calon investor, dunia usaha, industri, dan sebagainya. Pengetahuan dan pemahaman yang baik dari *stakeholders* tentang dinamika perekonomian Kota Surakarta diharapkan akan mendorong terwujudnya citra Kota Surakarta sebagai salah satu kota potensial untuk berusaha dan berinvestasi, melalui interaksi produktif antar *stakeholders*. Informasi tentang dinamika perekonomian Kota Surakarta perlu disajikan secara tepat, komprehensif, dan analitis. Dinamika perekonomian Kota Surakarta yang terjadi dan melalui evaluasi yang dilakukan akan memberikan informasi kepada *stakeholders* bagaimana posisi Kota Surakarta saat ini serta bagaimana kecenderungan ke depan.

Berbagai proyeksi makroekonomi dilakukan di tengah berbagai kemungkinan kondisi perekonomian ke depan. Situasi yang masih belum jelas mendorong perlunya kebijakan dan strategi yang antisipatif. Bank Indonesia memperkirakan **pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2023 tetap kuat pada kisaran 4,5-5,3%**, dan akan terus meningkat menjadi 4,7-5,5% pada 2024 didukung oleh konsumsi swasta, investasi, dan tetap positifnya kinerja ekspor di tengah pertumbuhan ekonomi global yang melambat. Inflasi diperkirakan kembali ke sasaran  $3\pm 1\%$  pada 2023 dan  $2,5\pm 1\%$  pada 2024. Pemicu yang menyebabkan munculnya isu resesi global ini adalah inflasi yang terjadi hampir di seluruh dunia yang tidak diimbangi dengan naiknya tingkat ekonomi dan daya beli masyarakat. Situasi ini diperparah dengan adanya konflik Rusia - Ukraina yang membuat harga energi semakin tinggi dan mendongkrak inflasi. Situasi perekonomian masih ditambah dengan kenaikan harga BBM, kenaikan tarif dasar listrik, kenaikan harga kebutuhan pokok, dan kondisi perekonomian yang cukup fluktuatif.

Sebagai daerah dengan perekonomian terbuka, dampak ekonomi nasional tersebut akan menjadikan Kota Surakarta ikut terpengaruh. Untuk itu diperlukan informasi tentang dinamika perekonomian Kota Surakarta saat ini dan kecenderungan ke depan dapat disajikan melalui dokumen Proyeksi Makroekonomi Kota Surakarta (Outlook). Proyeksi Makroekonomi Kota Surakarta (Outlook) merupakan rangkuman kegiatan ekonomi yang berisi rencana pemerintah dalam melaksanakan perekonomian serta rencana-rencana pembangunan kota serta kebijakan-kebijakan yang akan diambil pemerintah di tahun depan (2023). Proyeksi Makroekonomi Kota Surakarta (Outlook) memungkinkan masyarakat dan *stakeholders* mengetahui dan memahami dinamika perekonomian Kota Surakarta dalam satu genggaman. Data dan informasi dalam Proyeksi Makroekonomi Kota Surakarta (Outlook) merupakan data yang disusun secara lengkap dan sistematis menggunakan alat analisis yang sederhana agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat dan *stakeholders*. Melalui Proyeksi Makroekonomi Kota Surakarta (Outlook) diharapkan masyarakat dan *stakeholders* memiliki pemahaman yang lengkap sekaligus analitis tentang perekonomian Kota Surakarta.

## **1.2. MAKSUD DAN TUJUAN**

### **1.2.1. Maksud**

Proyeksi Makroekonomi Kota Surakarta (Outlook) dimaksudkan agar stakeholder dan kalangan bisnis memahami arah kebijakan perekonomian kota.

### **1.2.2. Tujuan**

1. Menghitung proyeksi makroekonomi Kota Surakarta tahun 2023 (outlook) yang disajikan secara triwulanan dan atau tahunan.
2. Menyajikan hasil analisis dinamika perekonomian Kota Surakarta secara sederhana namun komprehensif dalam rangka

mempermudah masyarakat dan *stakeholders* memahami kondisi perekonomian Kota Surakarta saat ini serta gambaran arah pembangunan ekonomi kedepan.

3. Mempermudah masyarakat dan *stakeholders* memahami dinamika perekonomian Kota Surakarta dalam sebuah informasi yang terpadu.
4. Mendorong semua pihak untuk melakukan berbagai aktivitas ekonomi di Kota Surakarta serta menjadikan Kota Surakarta sebagai salah satu kota tujuan utama dalam kegiatan ekonomi.

### **1.3. OUTPUT**

Output dari penyusunan Proyeksi Makroekonomi Kota Surakarta (Outlook) adalah sebuah dokumen Proyeksi Makroekonomi Kota Surakarta (Outlook) yang memungkinkan untuk dapat disajikan dalam bentuk publikasi yang ringkas, komprehensif, dan analitis dengan alat analisis sederhana sehingga *stakeholders* dan kalangan bisnis memahami arah perekonomian Kota Surakarta.

### **1.4. LINGKUP KEGIATAN**

Lingkup Proyeksi Makroekonomi Kota Surakarta (Outlook) meliputi analisis kondisi *existing* dan proyeksi berbagai indikator penting perekonomian Kota Surakarta yang disusun sesuai dengan topik tertentu agar lebih mudah dan sistematis dalam memahami berbagai aspek perekonomian Kota Surakarta.

#### **1.4.1. Aspek Perekonomian**

##### 1). Makroekonomi

Makroekonomi berisi hasil analisis tentang pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan sektoral, pergeseran sektoral, elastisitas sektoral, potensi sektor ekonomi.

## 2). Inflasi

Inflasi berisi hasil analisis tentang dinamika laju inflasi, inflasi sektoral, inflasi berdasarkan komoditas utama, relevansi inflasi dengan pertumbuhan ekonomi.

## 3). Investasi

Investasi berisi hasil analisis kinerja investasi di Kota Surakarta, ICOR, ICOR sektoral, relevansi investasi dengan pertumbuhan ekonomi.

### **1.4.2. Aspek Sosial**

#### 1). Kependudukan dan Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan berisi analisis berbagai indikator kependudukan dan ketenagakerjaan seperti *dependency ratio*, struktur penduduk, angkatan kerja, tingkat pengangguran, produktivitas tenaga kerja, elastisitas tenaga kerja, struktur tenaga kerja.

#### 2). Kemiskinan dan Ketimpangan

Kemiskinan dan ketimpangan berisi analisis tentang tingkat kemiskinan, tingkat ketimpangan distribusi pendapatan, indeks kemiskinan.

#### 3). Kesejahteraan

Kesejahteraan berisi analisis Indeks Pembangunan Manusia, pendapatan per kapita, pengeluaran per kapita, perkembangan Upah Minimum Regional (UMR).

### **1.4.3. Proyeksi**

Proyeksi 2023 secara triwulanan dan atau tahunan sesuai dengan dinamika kondisi dan isu strategis yang terjadi.

### **BAB III**

## **KONSEP DAN METODOLOGI**

### **2.1. PERTUMBUHAN EKONOMI**

Pertumbuhan ekonomi tahunan adalah kenaikan PDRB dari tahun ke tahun. PDRB diartikan sebagai nilai akhir dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh perekonomian daerah dalam kurun waktu satu tahun. PDRB dihitung dengan pendekatan pendapatan, pendekatan hasil produksi, serta pendekatan pengeluaran. Pendekatan pendapatan yang menghitung PDRB dari empat komponen pendapatan (upah/gaji, bunga, sewa, dan laba) belum dipergunakan di Indonesia, sehingga pendapatan nasional maupun PDRB menggunakan pendekatan hasil produksi dari sector ekonomi atau lapangan usaha, serta pendekatan pengeluaran dari empat sector (rumah tangga, swasta, pemerintah, dan luar negeri).

PDRB dihitung menggunakan dasar harga berlaku (*current price*) dan harga konstan (*constant price*). PDRB yang dihitung dengan menggunakan harga berlaku disebut juga dengan PDRB nominal, sehingga nilai output dihitung berdasarkan harga yang berlaku saat itu. Sebaliknya, PDRB yang dihitung dengan menggunakan harga konstan disebut juga dengan PDRB riil karena nilai output dihitung berdasarkan patokan harga pada tahun tertentu (tahun dasar). PDRB ini disebut dengan PDRB riil karena secara riil mengukur kemampuan daerah dalam menghasilkan output dengan menghilangkan pengaruh kenaikan harga (inflasi). PDRB atas dasar harga konstan ini dijadikan dasar dalam menghitung pertumbuhan ekonomi, yaitu kenaikan nilai output dari satu periode ke periode berikutnya.

PDRB dengan menggunakan hasil produksi merupakan PDRB yang dihitung berdasarkan nilai output dari 17 sektor ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan dinamika aktivitas masyarakat dalam perekonomian, sehingga pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi salah

satu hal yang menjadi tujuan pemerintah termasuk pemerintah daerah. Banyak factor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, seperti dalam teori klasik atau neoklasik misalnya pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh faktor sumber daya alam, teknologi, akumulasi modal, teknologi, serta jumlah penduduk. Selanjutnya teori neoklasik menambahkan pentingnya factor inovasi dan kewirausahaan dalam pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya teori pertumbuhan Neokeynes yang dipelopori Harrod-Domar misalnya, menekankan pentingnya akumulasi modal atau investasi serta tenaga kerja dalam pertumbuhan ekonomi.

Model pertumbuhan neoklasik Solow merupakan pilar yang sangat mewarnai teori pertumbuhan neoklasik. Pada intinya, model ini merupakan pengembangan dari formulasi Harrod-Domar, dengan menambahkan faktor kedua, yaitu tenaga kerja, serta memperkenalkan variabel independen ketiga, yaitu teknologi, ke dalam fungsi persamaan pertumbuhan. Namun, berbeda dari model Harrod-Domar yang mengasumsikan skala hasil tetap (*constant return to scale*) dengan koefisien baku, model pertumbuhan neoklasik Solow berpegang pada konsep skala hasil yang terus berkurang (*diminishing returns*) dari input tenaga kerja dan modal jika keduanya dianalisis secara terpisah; jika keduanya dianalisis secara bersamaan atau sekaligus,

Solow juga menggunakan asumsi skala hasil tetap tersebut. Kemajuan teknologi ditetapkan sebagai faktor residu untuk menjelaskan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang, dan tinggi rendahnya pertumbuhan itu sendiri oleh Solow maupun para teoritis lainnya diasumsikan bersifat eksogen, atau selalu dipengaruhi oleh berbagai macam faktor (Todaro, 2000).

Tujuan Solow adalah untuk membuktikan bahwa model pertumbuhan Harrod-Domar adalah keliru dalam membuat kesimpulan bahwa skala hasil tetap dari tabungan dan investasi dan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Solow menunjukkan bahwa, dengan skala

hasil yang terus berkurang, investasi yang berkelanjutan, dengan sendirinya, tidak dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang permanen karena skala hasil yang terus berkurang pada akhirnya akan menyebabkan keuntungan dari output karena investasi akan mendekati nol (Van den Berg, 2001).

Menurut teori pertumbuhan neoklasik tradisional (lama), pertumbuhan output itu selalu bersumber dari satu atau lebih dari tiga faktor: kenaikan kuantitas dan kualitas tenaga kerja (melalui pertumbuhan jumlah penduduk dan perbaikan pendidikan), penambahan modal (melalui tabungan dan investasi), serta penyempurnaan teknologi. Lebih lanjut dikemukakan bahwa perekonomian tertutup, yakni yang tidak menjalin hubungan dengan pihak-pihak luar, yang tingkat tabungannya rendah, maka *ceteris paribus* perekonomian itu dalam jangka pendek pasti mengalami laju pertumbuhan yang lebih lambat apabila dibandingkan dengan perekonomian lainnya yang memiliki tingkat tabungan lebih tinggi. Pada akhirnya hal ini akan mengakibatkan konvergensi penurunan pendapatan perkapita (semua perekonomian tertutup akan sama-sama mengalami penurunan pendapatan perkapita).

Di lain pihak, perekonomian terbuka, yakni yang mengadakan hubungan perdagangan, investasi, dan sebagainya dengan negara atau pihak-pihak luar) pasti akan mengalami suatu konvergensi peningkatan pendapatan perkapita, karena arus permodalan akan mengalir deras dari negara-negara kaya ke negara-negara miskin dimana rasio modal-tenaga kerjanya masih rendah sehingga menjanjikan imbalan atau tingkat keuntungan investasi yang lebih tinggi.

## **2.2. INFLASI**

Menurut BPS, inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan.

Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Inflasi dihitung dari indeks harga konsumen, dalam kasus tertentu inflasi dapat dihitung menggunakan PDRB deflator, yaitu rasio antara PDRB ADHB dengan PDRB ADHK. Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan salah satu indikator ekonomi yang digunakan untuk mengukur tingkat perubahan harga (inflasi/deflasi) di tingkat konsumen. Dengan adanya perubahan pola konsumsi masyarakat, maka mulai Januari 2020, pengukuran inflasi di Indonesia menggunakan IHK tahun dasar 2018=100. Beberapa perubahan mendasar dalam penghitungan IHK (2018=100) dibandingkan (IHK 2012=100), khususnya dari sisi cakupan, klasifikasi pengelompokan komoditas, metodologi penghitungan IHK, paket komoditas, dan diagram timbang. Perubahan tersebut didasarkan pada Survei Biaya Hidup (SBH) yang dilaksanakan oleh BPS selama tahun 2018, sebagai salah satu bahan dasar utama dalam penghitungan IHK.

Pengelompokan komoditas untuk menghitung IHK didasarkan pada Classification of Individual Consumption According to Purpose (COICOP) 2018. Secara nasional pengelompokan komoditas terdiri dari 11 kelompok dan 43 subkelompok. Konkordansi pengelompokan IHK (2012=100) yang sebanyak 7 kelompok, berubah menjadi 11 kelompok pada IHK (2018=100), adalah sebagai berikut: kelompok makanan, minuman, dan tembakau; kelompok pakaian dan alas kaki; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga; kelompok kesehatan; kelompok transportasi; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan; kelompok rekreasi, olahraga dan budaya; pendidikan; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya.

Berdasarkan asalnya, inflasi dibagi menjadi 2 yaitu inflasi domestic dan inflasi impor. Inflasi domestic merupakan inflasi yang disebabkan karena factor dalam negeri atau dalam daerah sedangkan inflasi impor adalah inflasi yang disebabkan karena factor gejolak atau dinamika luar negeri atau luar daerah. Negara dengan tingkat ketergantungan tinggi terhadap luar negeri sangat rentan dengan inflasi impor. Dari sisi factor penyebabnya, inflasi juga dibedakan antara *demand pull inflation* dan *cost push inflation*. *Demand pull inflation* merupakan inflasi yang disebabkan karena kuatnya permintaan masyarakat atas suatu barang atau jasa, sedangkan *cost push inflation* merupakan inflasi yang disebabkan karena kenaikan biaya input seperti upah/gaji dan bahan baku. Menurut Bank Indonesia, dalam konteks makroekonomi *demand pull inflation* digambarkan oleh output riil yang melebihi output potensialnya atau permintaan total (*aggregate demand*) lebih besar dari pada kapasitas perekonomian. Sementara itu, faktor ekspektasi inflasi dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dan pelaku ekonomi dalam menggunakan ekspektasi angka inflasi dalam keputusan kegiatan ekonominya. Ekspektasi inflasi tersebut dapat bersifat adaptif atau *forward looking*. Hal ini tercermin dari perilaku pembentukan harga di tingkat produsen dan pedagang terutama pada saat menjelang hari-hari besar keagamaan (lebaran, natal, dan tahun baru) dan penentuan upah minimum provinsi (UMP).

Meskipun ketersediaan barang secara umum diperkirakan mencukupi dalam mendukung kenaikan permintaan, namun harga barang dan jasa pada saat-saat hari raya keagamaan meningkat lebih tinggi dari kondisi *supply-demand* tersebut. Demikian halnya pada saat penentuan UMP, pedagang ikut pula meningkatkan harga barang meski kenaikan upah tersebut tidak terlalu signifikan dalam mendorong peningkatan permintaan.

Lebih lanjut disebutkan, inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada

akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Pertama, inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan riil masyarakat akan terus turun sehingga standar hidup dari masyarakat turun dan akhirnya menjadikan semua orang, terutama orang miskin, bertambah miskin. Kedua, inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian (*uncertainty*) bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan. Pengalaman empiris menunjukkan bahwa inflasi yang tidak stabil akan menyulitkan keputusan masyarakat dalam melakukan konsumsi, investasi, dan produksi, yang pada akhirnya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi. Ketiga, tingkat inflasi domestik yang lebih tinggi dibanding dengan tingkat inflasi di negara tetangga menjadikan tingkat bunga domestik riil menjadi tidak kompetitif sehingga dapat memberikan tekanan pada nilai Rupiah. Keempat, pentingnya kestabilan harga kaitannya dengan stabilitas sistem keuangan.

### **2.3. DEMOGRAFI DAN KEPENDUDUKAN**

Penduduk terbagi menjadi dua kelompok, yaitu penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. Penduduk usia kerja adalah penduduk berumur 15 tahun dan lebih. Penduduk usia kerja dikelompokkan menjadi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi.

Pengertian “bekerja” menurut BPS adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu

memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pola kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.

Menurut BPS, penganggur terbuka, terdiri dari:

- a. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan.
- b. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha.
- c. Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.
- d. Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Keterkaitan penduduk dan pembangunan ekonomi mengandung pemikiran penting. *Pertama*, kependudukan, atau dalam hal ini adalah penduduk, merupakan pusat dari seluruh kebijaksanaan dan program pembangunan yang dilakukan. Pembangunan baru dikatakan berhasil jika mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk dalam arti yang luas. *Kedua*, keadaan dan kondisi kependudukan yang ada sangat mempengaruhi dinamika pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Jumlah penduduk yang besar jika diikuti dengan kualitas penduduk yang memadai akan merupakan pendorong bagi pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya jumlah penduduk yang besar jika diikuti dengan tingkat kualitas yang rendah, menjadikan penduduk tersebut sebagai beban bagi pembangunan. *Ketiga*, dampak dinamika kependudukan baru akan terasa dalam jangka yang panjang. Karena dampaknya baru terasa dalam jangka waktu yang panjang, sering kali peranan penting penduduk dalam pembangunan terabaikan.

Aspek kependudukan dalam pembangunan daerah membawa beberapa permasalahan. *Pertama*, pertumbuhan penduduk yang tinggi membawa konsekuensi munculnya permasalahan yang berkaitan dengan tingkat kesejahteraan penduduk. Pemerintah daerah memiliki tugas dan

kewajiban untuk menjamin setiap penduduk mendapatkan kesejahteraan. Tingginya pertumbuhan penduduk di daerah membuat tugas tersebut perlu mendapatkan perhatian ekstra. *Kedua*, pertumbuhan penduduk yang tinggi membawa dampak pada meningkatnya angka penduduk usia kerja (penduduk yang berusia 15 tahun ke atas) dan hal ini memperbesar jumlah angkatan kerja. Peningkatan angkatan kerja mengharuskan pemerintah daerah untuk mampu mendorong dan memberikan stimulus yang mengarah pada peningkatan pemberdayaan masyarakat, bahkan pemerintah daerah dituntut untuk mampu menciptakan lapangan kerja. *Ketiga*, pertumbuhan penduduk yang tinggi berpotensi menciptakan kemiskinan dan ketimpangan, apabila tidak diikuti dengan kualitas sumber daya manusia serta pertumbuhan ekonomi daerah yang mendorong aktivitas ekonomi masyarakat.

#### **2.4. ASPEK SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN PENDUDUK**

Tujuan akhir dari pembangunan daerah adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat atau meningkatnya taraf hidup masyarakat. Peningkatan taraf hidup masyarakat ini antara lain ditandai dengan penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan daya beli, pengurangan tingkat pengangguran, pengurangan tingkat ketimpangan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Di sisi lain seringkali pembangunan daerah menyebabkan munculnya “rantai yang hilang” dalam arti bahwa kinerja pembangunan ekonomi daerah justru tidak mampu menekan tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, atau tingkat ketimpangan secara signifikan. Dari sisi pertumbuhan, pembangunan daerah dikatakan berhasil apabila terbukti terjadi kenaikan output riil yang terukur dari nilai PDRB yang bersumber dari sektoral ekonomi. Kenaikan output tersebut secara teoritis harusnya mampu mengurangi pengangguran melalui penciptaan lapangan kerja baru, namun sering terjadi pertumbuhan ekonomi tidak mampu menyerap

tenaga kerja baru atau tidak mampu mengurangi tingkat pengangguran. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: **pertama**, struktur ekonomi daerah memiliki ketergantungan tinggi terhadap sektor ekonomi tertentu sehingga kenaikan output riil sebagian besar tergantung dari sektor tersebut. **Kedua**, struktur ekonomi daerah memiliki *backward* dan *forward linkages* yang lemah sehingga dinamika suatu sektor tidak mampu menimbulkan *multiplier effect* sektor lainnya sehingga kemampuan menyerap tenaga kerja menjadi rendah. **Ketiga**, angkatan kerja yang ada tidak memiliki *skills* atau kompetensi sesuai dengan perkembangan ekonomi yang ada sehingga memunculkan *mismatch* antara permintaan dan penawaran tenaga kerja. **Keempat**, daerah belum memiliki perencanaan yang komprehensif yang mampu mengkaitkan pertumbuhan ekonomi dengan penyerapan tenaga kerja sehingga kinerja pertumbuhan ekonomi masih dianggap sebagai tolok ukur utama keberhasilan pembangunan daerah. **Kelima**, tidak adanya *link and match* antara pendidikan dan industri sehingga muncul kesenjangan dan pengangguran terdidik. Lebih jauh lagi pengembangan pendidikan tidak disesuaikan dengan potensi sumber daya yang ada di daerah. **Keenam**, adanya berbagai dinamika faktor eksternal yang tidak mampu diantisipasi oleh daerah.

Studi yang dilakukan oleh Bank Dunia menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi di berbagai negara ternyata tidak mampu mereduksi pengangguran dan atau kemiskinan, dan kesenjangan distribusi pendapatan semakin melebar. Pengangguran memiliki ketrkaitan yang erat dengan kemiskinan karena kemiskinan mencerminkan ketidakmampuan seseorang memenuhi kebutuhan hidup dasar, sementara untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar tersebut dibutuhkan penghasilan dari pekerjaan yang dilakukan. Dalam jangka panjang, tingginya pengangguran akan menimbulkan permasalahan sosial yang sangat serius, sehingga perlu adanya suatu kebijakan, strategi, dan program yang mampu secara komprehensif menekan tingkat pengangguran

agar pertumbuhan ekonomi daerah mampu secara nyata memberikan manfaat kepada masyarakat dalam bentuk perluasan lapangan kerja. Komprehensif mengandung arti bahwa strategi pengurangan tingkat pengangguran perlu diimplementasikan secara multi sektoral dan multi dimensi secara memberikan *impact* kuat dalam jangka panjang.

Fakta yang ada menunjukkan bahwa pengangguran seringkali tidak semata-mata faktor ekonomi, namun juga dipengaruhi oleh faktor budaya. Oleh karena itu, strategi pengurangan tingkat pengangguran harus mampu pula untuk mengubah *mindset* atau pola pikir penduduk dari yang kurang aktif dan kreatif, menjadi proaktif dan lebih kreatif, kemudian mendorong penduduk bukan saja sebagai *job seeker* namun juga diarahkan dalam jangka panjang menjadi *job creator*, serta memberdayakan penduduk untuk mengembangkan potensi ekonomi daerah dengan kegiatan ekonomi nyata sehingga penduduk merasa sebagai subyek sekaligus obyek pembangunan.

Dengan demikian kesejahteraan masyarakat menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan salah satunya melalui pertumbuhan ekonomi. Namun, pertumbuhan ekonomi saja tidak akan menjamin harapan untuk mensejahterakan rakyat mudah tercapai. Perlunya pengembangan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dapat mempermudah pemerintah dalam mewujudkan kehidupan yang sejahtera.

## **2.5. KONSEP PERTUMBUHAN EKONOMI BERKUALITAS**

Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas kini sudah menjadi hal penting bagi suatu negara termasuk Indonesia. Negara Indonesia yang juga menganut otonomi daerah mengharuskan tiap daerah memiliki pertumbuhan ekonomi dengan kualitas yang baik. Namun, pertumbuhan ekonomi dapat menimbulkan *trade off* seperti adanya kesenjangan, degradasi lingkungan, pemborosan sumber daya, kemiskinan, dan inflasi.

Oleh karena itu, tujuan untuk mensejahterakan rakyat akan semakin jauh dari harapan karena masyarakat justru mengalami ketimpangan yang ditunjukkan melalui indeks gini yang semakin melebar. Pembahasan ini berupaya mencari solusi terhadap hambatan dan kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Surakarta.

Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas memiliki relevansi yang sangat kuat dengan konsep pembangunan ekonomi yang inklusif. Hal ini terlihat dari karakteristik keduanya yang memiliki muara sama dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi dengan unsur pertumbuhan, partisipasi, berkeadilan, berkelanjutan, dan bersifat stabil. Dengan demikian, inklusivitas secara langsung atau tidak langsung menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

Konsep pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yang pada dasarnya adalah karakteristik pertumbuhan ekonomi yang membawa pada kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat baik di bidang ekonomi maupun sosial. Menurut Prasetyo (2008)<sup>1</sup> pertumbuhan ekonomi yang berkualitas memperhitungkan pemerataan pendapatan serta pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Permasalahan yang muncul dalam konsep pertumbuhan ekonomi yang berkualitas akan berdampak pula pada inklusivitas pembangunan ekonomi, seperti pengangguran, pemerataan, kemiskinan, atau ketimpangan.

Pengukuran pertumbuhan ekonomi yang berkualitas memasukkan tiga dimensi yang saling berkorelasi. Dimensi yang pertama yaitu dimensi fundamental atau dimensi yang paling dasar dalam pembentukan pertumbuhan ekonomi. Dalam dimensi fundamental tersusun atas beberapa aspek pembentuk yaitu kekuatan pertumbuhan, stabilitas pertumbuhan, diversifikasi sumber pertumbuhan, orientasi keluar. Kedua, yaitu dimensi sosial yang terdiri dari aspek kesehatan dan pendidikan.

---

<sup>1</sup> Prasetyo, Eko.2008. "The Quality of Growth : Peran Teknologi dan Investasi Human Capital Sebagai Pemacu Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas". JEJAK, Volume 1, Nomor 1, September, 2008

Ketiga, yaitu dimensi kesejahteraan yang terdiri dari aspek pengangguran, kemiskinan, ketimpangan, dan daya beli (inflasi).

## **2.6. METODOLOGI**

### **2.6.1. Sumber data**

Data yang akan dipergunakan dalam penyusunan Proyeksi Makroekonomi Kota Surakarta (Outlook) bersumber dari :

1. Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surakarta
2. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah
3. Kota Surakarta dalam Angka
4. Provinsi Jawa Tengah dalam Angka
5. RPJMD Kota Surakarta 2021-2026
6. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kota Surakarta
7. Data dari OPD terkait yang relevan dengan topik Proyeksi Makroekonomi Kota Surakarta (Outlook)

### **2.6.2. Metode Analisis**

Metode analisis dipergunakan untuk melakukan analisis data existing makroekonomi Kota Surakarta. Alat analisis yang dipergunakan meliputi:

1) Analisis pertumbuhan dan rata-rata pertumbuhan (*growth rate*)

Analisis ini dimaksudkan untuk melihat persentase kenaikan suatu variabel makroekonomi dari waktu ke waktu serta rata-rata pertumbuhan dalam periode tertentu, sehingga dapat dicermati kecenderungan pergerakan suatu data.

2) Analisis proporsi

Analisis ini dimaksudkan untuk melihat proporsi suatu variabel dari waktu ke waktu sehingga dapat diidentifikasi terjadinya pergeseran struktur suatu variabel.

3) Analisis shift-share (SS)

Analisis ini dimaksudkan untuk melihat terjadinya pergeseran kontribusi sektor ekonomi dalam perekonomian untuk kurun waktu tertentu baik secara dinamis maupun statis, sekaligus untuk melihat sektor ekonomi yang memiliki keunggulan.

4) Analisis Location Quotient (LQ)

Analisis ini dimaksudkan untuk melihat apakah suatu sektor ekonomi merupakan sektor basis atau bukan basis dalam struktur perekonomian.

5) Analisis overlay

Analisis ini dimaksudkan untuk mengklasifikasikan sektor ekonomi ke dalam 4 kelompok: unggulan, andalan, berkembang, atau tertinggal berdasarkan nilai LQ dan SS.

6) Analisis perbandingan

Analisis ini dimaksudkan untuk melihat kinerja makroekonomi Kota Surakarta dibandingkan dengan Provinsi dan Nasional sehingga posisi makroekonomi Kota Surakarta dapat dilihat secara regional maupun nasional.

### **2.6.3. Metode Proyeksi**

Metode proyeksi yang dipergunakan dalam penyusunan Proyeksi Makroekonomi Kota Surakarta (Outlook) terdiri dari beberapa cara atau teknik. Hal ini sangat dipengaruhi oleh perilaku dan karakteristik data, sehingga satu metode proyeksi belum tentu dapat dipergunakan untuk semua jenis variabel makroekonomi. Metode yang dipergunakan dalam proyeksi meliputi:

1. Metode rata-rata pertumbuhan (growth rate)
2. Metode kuadrat terkecil (ordinary least square)
3. Metode rata-rata bergerak (moving average)
4. Metode eksponensial
5. Metode regresi
6. Metode regresi dan indeks musim

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM MAKROEKONOMI KOTA SURAKARTA**

#### **3.1. VISI DAN MISI KOTA SURAKARTA**

Visi Kota Surakarta Tahun 2021–2026 adalah:

*“MEWUJUDKAN SURAKARTA SEBAGAI KOTA BUDAYA YANG MODERN,  
TANGGUH, GESIT, KREATIF, DAN SEJAHTERA”.*

Penjabaran Visi Kota Budaya akan diterjemahkan dalam Misi. Misi merupakan upaya umum tentang bagaimana cara mewujudkan Visi. Misi juga menjadi alasan utama mengapa suatu organisasi harus ada dan bagaimana komitmen terus dijaga oleh segenap *stakeholders* selaku pemangku kepentingan dalam pembangunan.

Visi Kota Surakarta tersebut sebagai pemandu gerak bersama antara pemerintahan dan segenap warganya untuk membangun karakter Kota Surakarta, beralaskan semangat gotong royong sebagai modal sosial-budaya. Kota Surakarta terus tumbuh dan berkembang dalam aktivitas sosial, ekonomi, dan budaya, tanpa meninggalkan jati diri dan karakternya sebagai kota dengan warisan budaya yang kental, sebagai the Spirit of Java. Upaya mewujudkan kota modern dan masyarakat yang sejahtera bermodalkan warisan budaya gotong royong dilandasi dengan karakter kota: Tangguh, Gesit, Kreatif, dan Sejahtera.

Misi merupakan upaya umum tentang bagaimana cara mewujudkan Visi. Rumusan misi dan penjelasan elemen misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih sebagai berikut:

1. meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan;
2. memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan;

3. mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan;
4. meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum, di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga;
5. mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan;
6. mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif; dan
7. mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati.

***Misi 1 Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan***

Misi 1 mengarahkan “Surakarta Sehat”, merupakan langkah terdepan untuk bangkit dari kondisi pandemi COVID-19 dan menjadi pembelajaran kearifan untuk menghadapi kemungkinan bentuk tantangan kesehatan lainnya. Pemerintah Kota Surakarta memastikan agar kasus COVID-19 segera teratasi dan memberi rasa aman kepada seluruh masyarakat Surakarta. Selain itu juga membangun masyarakat yang peduli menjaga kesehatan dari COVID-19 atau tantangan penyakit lainnya dan beradaptasi dengan kehidupan baru. Pada konteks yang lebih luas, misi kesehatan ini mengarah pada upaya mewujudkan resiliensi masyarakat, yaitu membangun kapabilitas masyarakat yang adaptif dan tangguh menghadapi era disruptif dengan tantangan perubahan yang tak terduga. Selain itu juga membentuk masyarakat berbudaya sehat, melalui pendekatan promotif dan preventif untuk menurunkan angka kesakitan sehingga berdampak pada efisiensi anggaran kesehatan masyarakat.

Budaya sehat juga bermakna kemampuan masyarakat memanfaatkan sumberdaya bahan-bahan kesehatan tradisional dan kearifan lokal di bidang kesehatan bersinergi dengan setor pemajuan kebudayaan dan pariwisata menjadi produk wellness tourism. Resiliensi di bidang kesehatan memerlukan gotong royong berbagai pihak supaya universal health coverage (cakupan pemilikan jaminan kesehatan) terpenuhi, sehingga masyarakat mampu mengakses layanan kesehatan kuratif.

***Misi 2 Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan***

Misi 2 mengarahkan “Surakarta Kreatif-Makmur”, bertujuan menjawab tantangan di bidang ekonomi, khususnya mendorong gairah warga kota bangkit bersama paska pandemi COVID-19 dalam tatanan normal baru. Pengalaman menghadapi pandemi COVID-19 diharapkan menjadi pembelajaran bagi kepemimpinan pemerintah kota supaya lebih inovatif dan kolaboratif untuk: (i) memfasilitasi pelaku UMKM terdampak COVID-19; (ii) menggerakkan perdagangan ekspor; (iii) menggaet investor untuk berinvestasi; dan (iv) orang berkunjung dan membelanjakan uangnya di Kota Surakarta sehingga pertumbuhan sektor riil meningkat. Pada gilirannya meningkat pula kontribusinya pada pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif. Pertumbuhan ekonomi yang adaptif memperhatikan komponen lapangan usaha yang kritis sebagai penopang ekonomi dan kesejahteraan penduduknya.

***Misi 3 Mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan***

Misi 3 mengarahkan “Surakarta Maju”, memandu Pemerintah Kota Surakarta mengatasi tantangan kota modern seperti mengangkat citra Kota Budaya. Permasalahan kecukupan infrastruktur berstandar kualitas baik,

inklusif, ramah lingkungan, dan menguatkan ingatan masyarakat pada sejarah peradaban daerah harus dikelola dalam kerangka memajukan Kota Surakarta sebagai Kota Budaya Modern. Misi 3 ini mengarahkan pengembangan tata ruang beridentitas budaya untuk memantapkan peran Kota Surakarta sebagai Kota Budaya sekaligus sebagai Pusat Kegiatan Nasional, mempertimbangkan keterpaduan dengan daerah sekitar untuk menguatkan peran Kota Surakarta sebagai pusat perdagangan dan budaya. Kawasan pusat pelayanan diarahkan menyebar, sehingga perkembangan kota bisa merata sampai ke pinggiran, sehingga mengurangi risiko kemacetan dan beban jalan.

Misi 3 memandu pengembangan wilayah dan penataan ruang harus dikelola dengan visi Solo Past as Solo Future, sehingga Kota Surakarta tetap berkembang modern namun keunikannya sebagai kota budaya tidak hilang. RTRW Kota Surakarta merumuskan bahwa tantangan pembangunan transportasi publik Kota Surakarta dari aspek tata ruang adalah sulitnya menggeser pusat-pusat aktivitas warga dari kawasan tengah kota.

***Misi 4 Meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga***

Misi 4 mengarahkan “Surakarta Kreatif-Unggul”. Pembangunan diarahkan pada upaya menumbuhkan masyarakat cerdas berkarakter unggul. Kelompok pemuda (usia 16–30 tahun) dijadikan sebagai target khusus, untuk ditingkatkan kemampuan kepemimpinannya di bidang ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Cerdas, terdidik, dan berkarakter unggul adalah modal dasar keberdayaan produktivitas dan keunggulan masyarakat. Kemajuan teknologi informasi memperbesar terpaan paham dunia melalui jaringan media sosial yang tak jarang berpotensi merusak karakter dasar masyarakat yang adiluhung.

***Misi 5 Mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan.***

Misi 5 mengarahkan “Surakarta Gesit”, merepresentasikan konsep agile government dan adaptive government. Pemerintah yang gesit memiliki kapasitas untuk memahami dan memenuhi kebutuhan publik dalam jangka pendek, beradaptasi dengan tren dan masalah dalam jangka menengah, dan membentuk kebutuhan publik dalam jangka panjang. Pemerintahan yang agile, yaitu lincah, gesit, cerdas, tangkas, digambarkan dengan penerapan manajemen yang inovatif, responsif, dan sensitif melalui penciptaan struktur organisasi yang adaptif, pemanfaatan teknologi informasi yang cerdas dan antisipasi terhadap lingkungan disruptif di berbagai sektor. Misi 5 memandu penyederhanaan birokrasi dan pelayanan publik agar kebijakan dapat diputuskan dengan cepat, tepat, dan responsif. Birokrasi tidak perlu alergi dengan masukan, keluhan, dan aduan masyarakat. Perlu juga ditingkatkan penerapan birokrasi digital, standarisasi pelayanan, dan profesionalisme aparatur sipil negara (ASN) untuk kecepatan dan ketepatan pelayanan. Standarisasi pelayanan dan profesionalisme ASN untuk memastikan birokrasi tetap berjalan efektif, cepat, dan responsif dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pemerintah yang adaptif adalah pemerintah yang mampu membangun kolaborasi (collaborative governance).

***Misi 6 Mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif***

Misi 6 mengarahkan “Surakarta Sejahtera”, sebagai agenda kebangkitan dari COVID-19 dengan membangun solidaritas dan gotong royong warga, serta bantuan sosial pada warga terdampak. Misi 6 menggunakan kasus COVID-19 sebagai analog untuk menjelaskan tantangan konsep kebijakan

kesejahteraan sosial secara makro untuk memperkuat daya resiliensi masyarakat Kota Surakarta. Kesejahteraan sosial dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Tujuan utama dari kesejahteraan sosial adalah tercapainya kondisi sejahtera yang bisa diasumsikan ke dalam terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat seperti sandang, pangan, dan papan yang menjadi kebutuhan minimal masyarakat, serta bisa menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungannya. Kesejahteraan sosial bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi tekanan-tekanan yang diakibatkan terjadinya perubahan-perubahan sosial ekonomi, menghindari terjadinya konsekuensi konsekuensi sosial yang negatif akibat pembangunan serta menciptakan kondisi-kondisi yang mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan pemerintah untuk kesejahteraan sosial perlu dikawal supaya efektif memenuhi fungsi: a. fungsi pencegahan: memperkuat individu, keluarga, dan masyarakat supaya terhindar dari masalah-masalah sosial baru; b. penyembuhan/pemulihan: menghilangkan kondisi-kondisi ketidakmampuan fisik, emosional, dan sosial agar orang yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi kembali secara wajar dalam masyarakat; c. fungsi pengembangan: pengembangan tatanan dan sumber-sumber daya sosial dalam masyarakat untuk berkontribusi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial; dan d. fungsi penunjang: kegiatan-kegiatan untuk membantu mencapai tujuan sektor atau bidang pelayanan kesejahteraan sosial yang lain.

***Misi 7 Mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati***

Misi 7 mengarahkan “Surakarta Tangguh”, yaitu mengupayakan peningkatan kualitas ketentraman dan ketertiban masyarakat dan ketangguhan menghadapi risiko bencana. Pemerintah dengan cara-cara kreatif dan inovatif mengupayakan peningkatan edukasi tentang keberagaman, dan toleransi kepada seluruh lapisan masyarakat sejak usia dini. Pemerintah juga harus meningkatkan kualitas koordinasi lintas sektor untuk pengembangan masyarakat tangguh bencana dalam rangka manajemen penurunan risiko bencana.

Untuk mewujudkan visi dan misi di atas, Surakarta perlu melakukan kerjasama dengan daerah sekitar. Hal ini juga dilatarbelakangi oleh poisisi geogafis Surakarta yang sangat strategis. Dalam RPJMD, sesuai RTRW Kawasan Kerjasama Regional yang terkait dengan Kota Surakarta adalah Kawasan Subosukawonosraten dan Kawasan Sosebo (Solo, Selo/Boyolali, dan Borobudur) yang memiliki SDA, kesuburan tanah, dan objek wisata. Dalam regional Provinsi Jawa Tengah, Kota Surakarta dijadikan kawasan peruntukan industri skala wilayah untuk produk-produk unggulan berbasis industri kerajinan dan kawasan pariwisata.

Tingkat ketercapaian visi-misi dituangkan melalui berbagai indikator Antara lain indikator makroekonomi daerah seperti yang tertuang dalam RPJMD. Indikator tersebut dipergunakan sebagai salah satu bentuk evaluasi kinerja makroekonomi. Target indikator kinerja makroekonomi Kota Surakarta hingga 2022-2026 sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1.

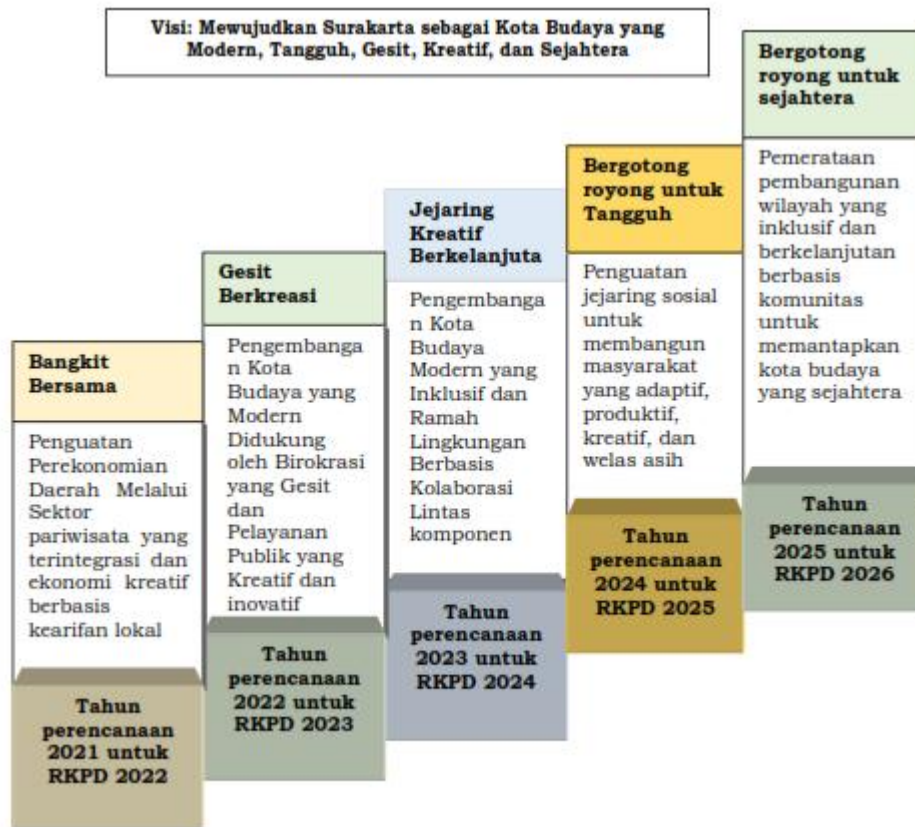
## Target Indikator Makroekonomi RPJMD Kota Surakarta 2021-2026

No	Indikator	Kondisi Awal	Target				
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Pertumbuhan ekonomi/PDRB	4,01	4,96	5,48	5,69	5,90	6,01
2	Tingkat inflasi	2,58	2,19	1,94	2,23	2,09	2,05
3	Indeks Williamson	0,356	0,351	0,348	0,346	0,343	0,340
4	Tingkat Kemiskinan (%)	9,40	8,25	7,89	7,56	7,23	6,92
9	Pendapatan per kapita ADHB (Rupiah)	93.736.221	97.956.890	102.879.440	108.264.383	114.157.465	120.490.619
11	TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) (%)	7,85	6,7	6,2	5,7	5,3	4,8

**3.2. TEMA PEMBANGUNAN KOTA SURAKARTA**

Menurut Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019, tema pembangunan untuk Kawasan Subosukawonosraten berdasarkan analisis serta potensi dan tantangan adalah: "Pembangunan Wilayah Subosukawonosraten Berbasis Pariwisata Terpadu yang Didukung oleh Pertanian dan Industri Pengolahan dengan Berlandaskan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan". Adapun maksud dari tema pembangunan adalah pembangunan wilayah yang bertumpu pada sektor utama pariwisata terpadu (alam, budaya, dan buatan) yang didukung oleh sektor pertanian dan industri pengolahan. Pembangunan wilayah dilakukan berlandaskan prinsip berkelanjutan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Tema pembangunan Kota Surakarta disajikan dalam gambar sebagai berikut:



Sumber: RPJMD Kota Surakarta 2022-2027

### 3.3. PERTUMBUHAN EKONOMI DAN STRUKTUR EKONOMI

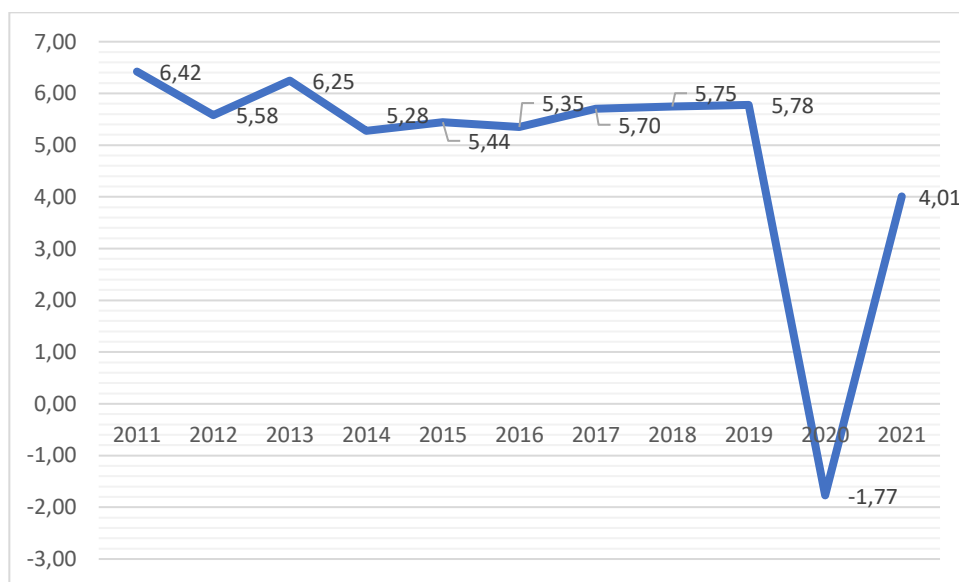
Pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta mencapai 4,01%. Angka ini menunjukkan kenaikan yang signifikan dibandingkan tahun 2020 yang mencapai -1,77%. Kenaikan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi ini menunjukkan bahwa dinamika perekonomian Kota Surakarta mulai menunjukkan adanya kebangkitan setelah Pandemi Covid-19 selama 2019-2020.

Hal yang penting untuk dicermati adalah bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada tahun 2021 tersebut belum dapat dikatakan stabil, namun masih dalam kerangka recovery, sehingga masih memungkinkan terjadinya shock baik secara internal maupun eksternal. Selain itu, pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta selama 2010-2021 meski

relative tinggi terlihat menunjukkan tren yang cenderung menurun secara perlahan. Upaya ini perlu diantisipasi melalui kebijakan dan strategi yang *pro growth*, misalnya seperti penguatan investasi, penerimaan PAD, serta pengembangan ekonomi kreatif dan UMKM.

Grafik 3.1.

Pertumbuhan Ekonomi Kota Surakarta 2011-2021



Sumber: BPS Kota Surakarta, diolah

Berdasarkan pendekatan harga berlaku (*current price*), perekonomian Surakarta pada tahun 2021 didominasi oleh 4 sektor utama, yaitu sector konstruksi (26,65%), sector perdagangan besar dan eceran (21,96%), sector informasi dan komunikasi (14,86%), serta sector industri pengolahan (8,66%). Dari keempat sektor tersebut, hanya sektor konstruksi yang sedikit mengalami penurunan proporsi terhadap PDRB selama 2020-2021 sementara tiga sektor lainnya enunjukkan kenaikan.

Selama periode RPJMD 2016-2021, kontribusi beberapa sector yang menunjukkan peningkatan adalah sector industri pengolahan, sector pengadaan listrik dan gas, sector penyediaan akomodasi dan makan

minum, sector informasi dan komunikasi, sector jasa keuangan dan asuransi, sector jasa pendidikan, serta sector jasa kesehatan dan kesejahteraan social. Beberapa sector utama seperti sector industry pengolahan, sector perdagangan, sektor konstruksi terlihat menurun kontribusi meskipun relatif kecil.

Dengan demikian selama 2010-2021 terlihat adanya perseseran perubahan struktur ekonomi Surakarta secara gradual menjadi kota perdagangan, jasa, dan industry yang didukung dengan transportasi dan pendidikan. Perubahan struktur secara gradual atau perlahan tersebut sangat wajar mengingat perubahan struktur ekonomi yang dinamis pada umumnya terjadi pada jangka waktu yang sangat lama.

Tabel 3.2.

Struktur PDRB Kota Surakarta 2010-2021

Lapangan Usaha	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,50	0,52	0,51	0,54	0,52	0,52	0,52	0,50	0,49	0,49	0,51	0,50
B. Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Industri Pengolahan	7,62	8,08	8,27	8,39	8,70	8,59	8,62	8,52	8,45	8,46	8,45	8,66
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,22	0,21	0,22	0,20	0,19	0,19	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,21
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,22	0,21	0,19	0,17	0,16	0,16	0,15	0,15	0,15	0,14	0,16	0,14
F. Konstruksi	28,23	27,04	26,99	26,50	26,80	26,91	26,98	26,78	27,14	27,11	27,04	26,65
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	23,82	24,42	23,34	23,52	22,79	22,56	22,48	22,35	22,15	22,16	21,63	21,96
H. Transportasi dan Pergudangan	2,64	2,49	2,42	2,45	2,59	2,68	2,63	2,59	2,55	2,59	1,03	1,04
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,87	4,98	5,36	5,55	5,70	5,76	5,83	5,66	5,49	5,41	4,58	4,72
J. Informasi dan Komunikasi	11,36	11,13	11,23	11,01	10,77	10,63	10,45	11,27	11,67	12,01	14,54	14,86
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	3,65	3,66	3,71	3,67	3,66	3,75	3,86	3,88	3,84	3,76	3,90	3,91
L. Real Estate	4,23	4,17	4,09	3,95	4,04	4,11	4,12	4,08	3,96	3,85	3,97	3,92
M,N. Jasa Perusahaan	0,64	0,67	0,69	0,72	0,73	0,78	0,82	0,81	0,84	0,86	0,81	0,80
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,46	6,08	6,17	6,10	5,89	5,97	5,96	5,73	5,54	5,40	5,39	5,11
P. Jasa Pendidikan	3,66	4,42	4,87	5,28	5,41	5,37	5,34	5,43	5,46	5,51	5,64	5,44
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,85	0,92	1,01	1,02	1,08	1,10	1,10	1,11	1,12	1,12	1,31	1,26
R,S,T,U. Jasa Lainnya	1,04	0,99	0,95	0,94	0,95	0,93	0,95	0,95	0,95	0,95	0,84	0,81

Produk Domestik Regional Bruto	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00
--------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--------

Sumber: BPS Kota Surakarta, diolah

Bila dilihat dari pendekatan pengeluaran, PDRB Kota Surakarta menunjukkan bahwa proporsi konsumsi rumah tangga selama 2011-2021 relatif stabil di kisaran 50%, sementara pengeluaran LNPRT menunjukkan tren proporsi yang meningkat. Pengeluaran pemerintah sepanjang 2011-2021 meski sedikit berfluktuasi namun proporsinya cenderung turun sedangkan pembentukan modal tetap bruto terlihat menunjukkan proporsi yang meningkat selama 2011-2019 dan sedikit mengalami penurunan pada tahun 2020, namun meningkat kembali di tahun 2021. Proporsi pembentukan modal tetap bruto yang cukup besar sepanjang 2011-2021 merupakan indikasi bahwa komponen investasi dalam pembentukan PDRB di Kota Surakarta memiliki peran yang sangat penting dan strategis, serta menunjukkan tren peningkatan. Untuk proporsi ekspor bersih, terlihat selama 2011-2021 menunjukkan deficit yang cukup besar, yang berarti masih tingginya impor barang dan jasa yang masuk ke Kota Surakarta dibandingkan ekspor barang dan jasa dari Kota Surakarta.

Tabel 3.3.

Struktur PDRB Kota Surakarta Berdasarkan Pengeluaran, 2011-2021

JENIS PENGELUARAN	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	50,77	50,89	51,79	51,99	51,93	50,83	50,75	50,84	50,44	51,53	50,53
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,55	0,56	0,59	0,62	0,60	0,61	0,61	0,63	0,65	0,61	0,61
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	11,70	11,85	12,15	12,13	12,51	11,61	11,46	10,97	10,61	9,59	9,55
Pembentukan Modal Tetap Bruto	66,46	66,40	66,38	67,55	66,90	67,64	67,73	70,15	70,57	64,29	67,78
Perubahan Inventori	4,06	6,78	4,21	2,54	0,63	0,23	0,35	0,71	0,61	0,63	0,61
Net Ekspor Barang dan Jasa	-33,54	-36,48	-35,14	-34,83	-32,58	-30,93	-30,89	-33,30	-32,87	-26,65	-29,08
<b>PDRB</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kota Surakarta, diolah

### 3.4. KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN

Jumlah penduduk Surakarta tahun 2021 berdasarkan data BPS Kota Surakarta 522.728. Tahun 2020, berdasarkan data sensus penduduk yang diselenggarakan oleh BPS, jumlah penduduk Kota Surakarta mencapai 522.364. di Tahun 2021 Sebagian besar penduduk berada di Kecamatan Banjarsari yaitu 32,31% dan paling sedikit berada di Kecamatan Serengan yaitu 9,15%. Meski Sebagian besar penduduk bermukim di Kecamatan Banjarsari, namun kepadatan penduduk di Kecamatan Banjarsari hanya 11.069 orang per km<sup>2</sup>, sedangkan Kecamatan terpadat adalah Kecamatan Pasar Kliwon yaitu 16.094 orang per km<sup>2</sup>. Kecamatan Serengan yang memiliki jumlah penduduk paling sedikit memiliki tingkat kepadatan yang besar yaitu 15.522 orang per km<sup>2</sup>.

Tabel 3.4.

Kepadatan dan Distribusi Penduduk per Kecamatan, 2020-2021

Kecamatan	Kepadatan (orang/KM <sup>2</sup> )		Distribusi Penduduk (%)	
	2020	2021	2020	2021
Laweyan	10245,83	9705,64	16,95	16,95
Serengan	14977,43	15522,17	9,15	9,15
Pasar Kliwon	16289,83	16094,02	15,03	15,03
Jebres	11031,4	9658,38	26,56	26,56
Banjarsari	11395,68	11069,13	32,31	32,31

Sumber: BPS Kota Surakarta

Berdasarkan kelompok umurnya persentase penduduk yang berusia 15-19 pada tahun 2021 memiliki persentase tertinggi yaitu 7,86% dan kelompok usia tertinggi kedua adalah penduduk usia 40-44 tahun yang mencapai 7,73%. Penduduk usia balita yaitu 0-4 tahun terlihat cukup tinggi yaitu 6,60%. Dari informasi struktur umur penduduk diperoleh informasi rasio ketergantungan (dependency ratio), yaitu perbandingan antara penduduk usia muda (0-14 tahun) dan usia tua (65 tahun ke atas)

terhadap penduduk usia produktif (15-64 tahun). Rasio ketergantungan antara laki-laki dan perempuan selama 2020-2021 tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan yaitu berkisar 40% yang berarti dari 100 penduduk usia produktif terdapat 40 penduduk bukan usia produktif, atau setiap 10 penduduk usia produktif menanggung 4 usia yang tidak produktif. Angka ini tergolong kecil, yang berarti SDM di Kota Surakarta didominasi oleh penduduk usia produktif.

Tabel 3.5.

Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur, 2020-2021

Kelompok Umur	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
0-4	17758	17585	17107	16924	34865	34509
5-9	18280	18067	17884	17697	36164	35764
10-14	20187	19912	19149	18925	39336	38837
15-19	21200	20921	20516	20172	41716	41093
20-24	20638	20237	20444	20014	41082	40251
25-29	19983	19794	19590	19364	39573	39158
30-34	19246	19134	18803	18659	38049	37793
35-39	19913	19909	19865	19753	39778	39662
40-44	20038	20077	20383	20315	40421	40392
45-49	18297	18430	18958	19041	37255	37471
50-54	16818	16988	18118	18264	34936	35252
55-59	14282	14542	16189	16517	30471	31059
60-64	11909	12184	13749	14148	25658	26332
65-69	9065	9423	10993	11457	20058	20880
70-74	5015	5341	6176	6566	11191	11907
75+	4414	4627	7397	7741	11811	12368

Sumber: BPS Kota Surakarta

Tabel 3.6.

## Rasio Ketergantungan, 2020-2021

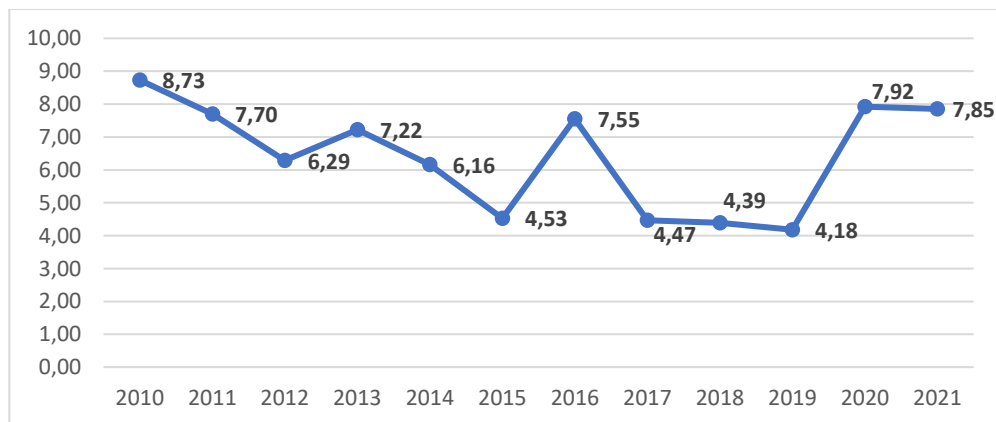
Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
2020	2021	2020	2021	2020	2021
40,98	41,14	42,18	42,58	41,59	41,87

Sumber: BPS Kota Surakarta, diolah

Pada aspek pengangguran, pada tahun 2021 tingkat pengangguran Kota Surakarta mencapai 7,85% sedikit menurun dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 7,92%. Tingkat pengangguran dihitung dari perbandingan antara jumlah pengangguran terbuka dengan angkatan kerja. Pengangguran yang terjadi pada tahun 2020 disebabkan karena lumpuhnya perekonomian akibat Pandemi Covid. Sepanjang 2010-2020 tingkat pengangguran tertinggi adalah pada tahun 2010 yang mencapai 8,73% dan yang terendah adalah tingkat pengangguran pada tahun 2019.

Grafik 3.2.

## Tingkat Pengangguran 2010-2021



Sumber: BPS Kota Surakarta

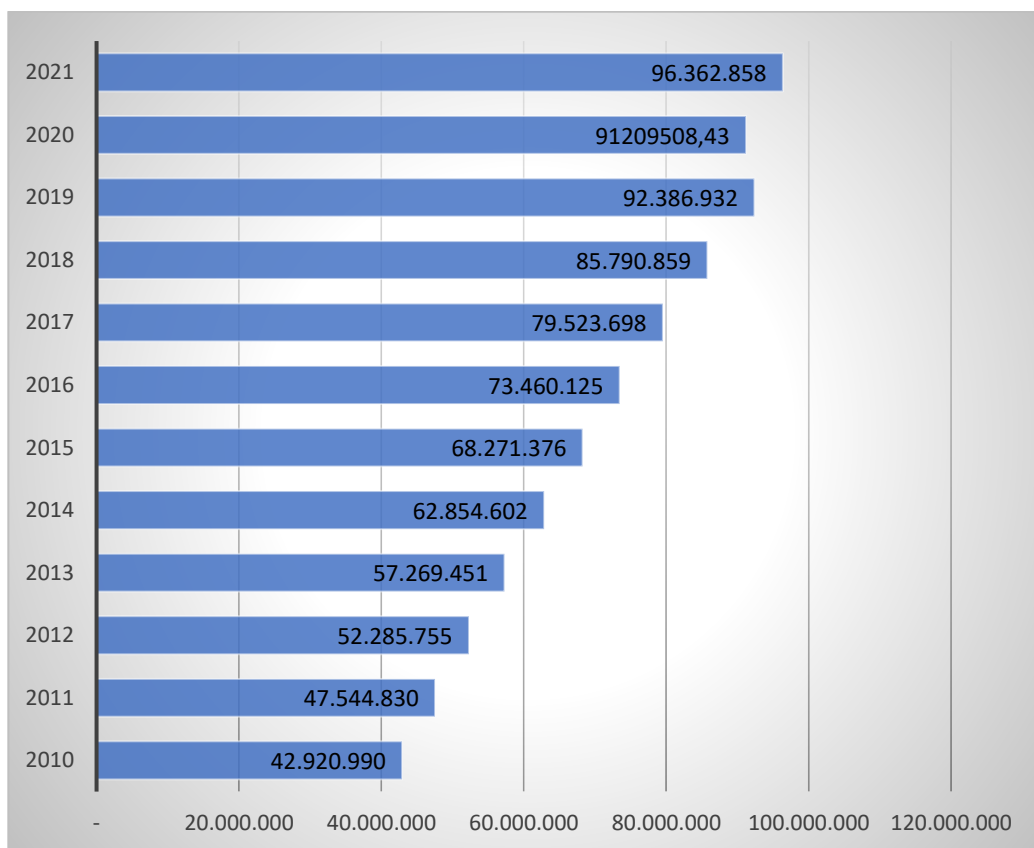
### 3.5. KESEJAHTERAAN

Salah satu indikator kesejahteraan adalah PDRB perkapita yang merupakan perbandingan antara PDRB dengan jumlah penduduk

pertengahan tahun. Pada tahun 2019 PDRB perkapita yang dihitung atas dasar harga berlaku adalah Rp92,38 juta. Angka ini naik dibandingkan PDRB perkapita tahun 2018 yang mencapai Rp85,6 juta. Hal ini berarti pendapatan per orang per tahun penduduk Surakarta adalah Rp92,38 juta. Di tahun 2021 PDRB perkapita ADHB menunjukkan angka Rp96,36 juta, meningkat dibandingkan tahun 2020 yang besarnya menjadi Rp91,20. PDRB perkapita sempat mengalami penurunan pada tahun selama 2019-2020 dari Rp92,38 juta menjadi Rp91,20 juta.

Grafik 3.3.

Pendapatan Perkapita Berdasar PDRB ADHB than 2010-2021



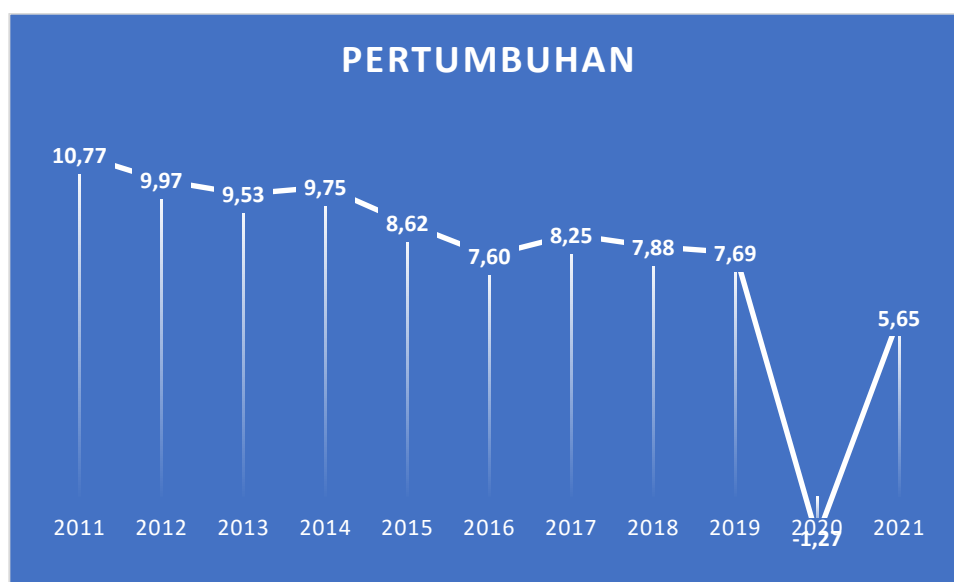
Sumber: BPS Kota Surakarta

Meskipun selama 2010-2019 PDRB perkapita menunjukkan tren yang terus naik, namun apabila dilihat dari pertumbuhan PDRB perkapita

tiap tahun terlihat tren pertumbuhan semakin menurun. Pertumbuhan pendapatan perkapita sepanjang 2010-2021 menunjukkan angka tertinggi adalah tahun 2011 yaitu sebesar 10,77%. Kenaikan pertumbuhan pendapatan perkapita sepanjang 2010-2019 terjadi dua kali yaitu pada pada tahun 2014 dari 9,52% di tahun 2013 menjadi 9,75% di tahun 2014 serta tahun 2017 lalu dari 7,60% di tahun 2016 menjadi 8,25% di tahun 2017.

Grafik 3.4.

Pertumbuhan Pendapatan Perkapita Tahun 2011-2021



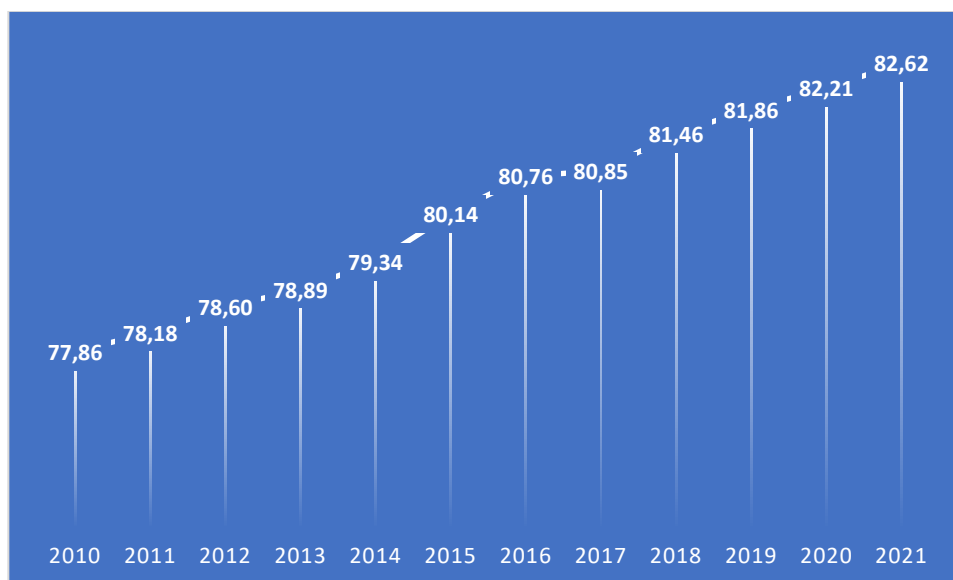
Sumber: BPS Kota Surakarta, diolah

Dari sisi nilai indeks pembangunan manusia (IPM), pada tahun 2021 nilai IPM Surakarta cukup tinggi yaitu 82,62; naik dibandingkan tahun 2020 yang besarnya 82,21. IPM merupakan indeks komposit yang terdiri dari beberapa ukuran yaitu rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, umur harapan hidup, serta pengeluaran perkapita. Sepanjang 2010-2021 nilai IPM menunjukkan kenaikan setiap tahun. Kenaikan yang terendah terjadi pada tahun 2016-2017. Nilai IPM Surakarta ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan IPM provinsi maupun nasional. Hal ini merupakan

indikasi bahwa pembangunan sumber daya manusia Surakarta menunjukkan keberhasilan.

Grafik 3.5.

Perkembangan IPM Kota Surakarta Tahun 2010-2021

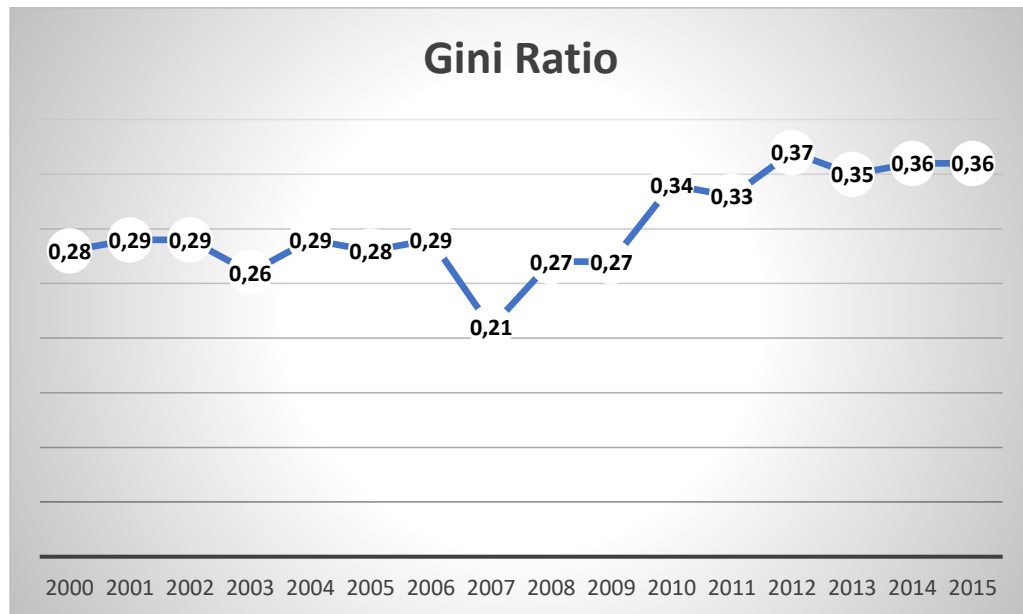


Sumber: BPS Kota Surakarta

Hal yang berbeda terjadi pada ukuran ketimpangan menggunakan Gini Ratio atau Indeks Gini. Ukuran ini menunjukkan indikasi terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan antar penduduk. Data indeks Gini tingkat kabupaten/kota yang dirilis oleh BPS terakhir tahun 2015, dan mulai tahun 2016 indeks Gini yang dihitung dan dipublikasikan adalah indeks Gini untuk wilayah provinsi dan nasional.

Data indeks Gini selama 2000-2015 menunjukkan tren kenaikan, yang berarti tingkat ketimpangan distribusi pendapatan antar penduduk semakin meningkat. Selama periode tersebut indeks Gini terendah terjadi pada tahun 2007 yaitu sebesar 0,21 dan mulai 2010 nilai indeks Gini di atas 0,30.

Grafik 3.6.  
Perkembangan Gini Ratio Tahun 2000-2015



Sumber: BPS Kota Surakarta

### 3.6. KEMISKINAN

Kemiskinan Surakarta dapat dilihat dari beberapa indikator seperti garis kemiskinan, jumlah penduduk miskin, tingkat kemiskinan, indeks kedalaman kemiskinan, dan indeks keparahan kemiskinan. Garis kemiskinan Surakarta tahun 2021 mencapai Rp511.216, naik sebesar 4,88% dibandingkan tahun 2020 yang besarnya Rp487.445. Jumlah penduduk miskin selama 2010-2021 secara keseluruhan menunjukkan tren penurunan, namun dari 2019-2021 terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin. Kenaikan jumlah penduduk miskin tersebut diikuti dengan kenaikan tingkat kemiskinan, yaitu rasio jumlah penduduk miskin terhadap jumlah penduduk pertengahan tahun yang menunjukkan tren penurunan selama 2010-2019, meningkat selama 2019-2021.

Dari ukuran kedalaman kemiskinan (P1), selama 2010-2021 terlihat berfluktuasi. Misal pada tahun 2010-2012 terlihat menurun namun pada tahun 2013 kembali naik. Demikian juga yang terjadi di tahun 2015, 2017,

dan 2019 yang menunjukkan kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Di tahun 2020 terjadi penurunan indeks P1 yaitu menjadi 1,5 dari tahun sebelumnya yang tercatat 1,6 namun tahun 2021 terjadi kenaikan yang cukup tajam menjadi 1,83. Nilai indeks P1 yang semakin kecil menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan.

Indeks keparahan kemiskinan (P2) selama 2010-2020 juga menunjukkan fluktuasi. Pola fluktuasi antara indeks P1 dengan indeks P2 terlihat sama. Indeks P2 tahun 2019 tercatat 0,48 dan di tahun 2020 terjadi penurunan cukup tajam menjadi 0,38 dan meningkat cukup tajam di tahun 2021 menjadi 0,54. Penurunan yang terjadi selama 2019-2020 menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin semakin menurun dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 3.7.

Indikator Kemiskinan Kota Surakarta Tahun 2010-2021

Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Penduduk Miskin (ribuan)	69,8	64,5	60,7	59,7	55,92	55,71	55,91	54,89	46,99	45,2	47,03	48,78
Tingkat Kemiskinan	13,96	12,92	12	11,74	10,95	10,89	10,88	10,65	9,08	8,7	9,03	9,40
Indeks Kedalaman Kemiskinan=P1	2.19	1.89	1.33	1.63	1.48	1.74	1.34	1.87	1.47	1.60	1,51	1,83
Indeks Keparahannya Kemiskinan=P2	0,53	0,46	0,28	0,34	0,3	0,4	0,35	0,44	0,35	0,48	0,38	0,54
Garis Kemiskinan	306.584	326.233	361.517	371.918	385.467	406.840	430.293	448.062	464.063	473.516	487.445	511.216

Sumber: BPS Kota Surakarta, diolah

## 2.7. INDIKATOR PENDIDIKAN

Dalam Pendidikan terdapat dua indikator penting yang dipergunakan dalam evaluasi kebijakan, yaitu angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM). APK adalah jumlah rasio siswa yang bersekolah pada jenjang Pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk pada usia sekolah jenjang tersebut. APK untuk jenjang SD tahun 2021 sebesar 106,24 yang berarti dari 100 penduduk usia SD/MI (7-12 tahun), terdapat

6 siswa yang usianya bukan dari usia SD/MI. APM adalah jumlah penduduk yang bersekolah sesuai dengan kelompok usianya. Misalnya APM SD/MI tahun 2021 adalah 99,23 yang berarti dari 100 penduduk usia 7-12 tahun, 99 diantaranya bersekolah di SD/MI.

Secara teoritis APM akan selalu lebih rendah dibandingkan dengan APK. Dari aspek jenjang pendidikan, nilai APK maupun APM SD/MI selama 2010-2021 adalah yang tertinggi dibandingkan jenjang SMP/MTs maupun SMA/SMK/MA. Nilai APK pada semua jenjang pendidikan selama 2010-2021 terlihat fluktuatif. Pola yang sama juga terjadi pada APM yang juga fluktuatif sepanjang 2010-2021. Bila diperbandingkan antar jenjang pendidikan, tidak terdapat pola yang sama. Hal ini disebabkan karena APK maupun APM dipengaruhi oleh struktur umur penduduk usia sekolah serta angka partisipasi sekolah. Nilai APK maupun APM Kota Surakarta ini tergolong tinggi dibandingkan daerah lain, meski bukan yang tertinggi. Pada tahun 2020 hanya APK SD yang sedikit mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 namun meningkat kembali di tahun 106,24.

Tabel 3.8.

APK dan APM Kota Surakarta Tahun 2010-2021

JENJANG	INDIKATOR	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
SD	APK	113,4	99,49	107,97	104,02	105,47	103,6	109,8	110,37	106,56	107,81	105,95	106,24
	APM	100	92,75	95,24	96,84	96,95	96,28	98,91	98,91	99,22	99,19	99,20	99,23
SMP/MTS	APK	82,14	91,45	98,82	95,25	93,31	89,88	84,81	87,93	84,55	89,03	92,50	94,04
	APM	72,62	70,45	82,03	87,92	83,90	78,55	81,28	81,25	79,34	80,60	82,58	83,49
SMA/SMK/MA	APK	92,17	90,77	65,4	65,1	71,25	100,93	110,64	103,55	80,85	77,92	81,43	79,62
	APM	65,22	67,17	52,48	60,48	63,87	69,94	63,48	65,41	65,26	66,12	67,88	67,21

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

**BAB IV**  
**ANALISIS KONDISI EKSISTING**  
**MAKROEKONOMI KOTA SURAKARTA**

**4.1. PROPORSI, STRUKTUR, DAN PERTUMBUHAN PDRB**

PDRB Surakarta ADHB pada tahun 2010 mencapai Rp21,49 trilyun dan pada tahun 2019 naik lebih dari dua kali lipat menjadi Rp48 trilyun, namun pada tahun 2020 terjadi kontraksi sebagai akibat pandemic Covid-19 sehingga PDRB ADHB Kota Surakarta turun menjadi Rp47,6 trilyun atau turun sebesar -0,75% dibanding tahun 2019. Tahun 2021 PDRB Kota Surakarta kembali meningkat menjadi Rp50,4 trilyun.

Pertumbuhan sektor terbesar PDRB ADHK pada tahun 2021 adalah sector penyediaan akomodasi makan dan minum yang mencapai 8,43% serta sector informasi dan komunikasi yang mencapai 7,68%. Di tahun 2021 terdapat dua sector yang mengalami pertumbuhan minus yaitu sector pertambangan dan penggalian (-14,77%) serta sector pengadaan air (-4,30%). Bila dihitung perubahan pertumbuhan pada periode 2020-2021 sector transportasi dan pergudangan menunjukkan kenaikan yang sangat tinggi, dari yang sebelumnya -62,54 di tahun 2020 menjadi 3,46% di tahun 2021.

Dari sisi struktur PDRB, pada tahun 2021 PDRB Surakarta didominasi oleh kontribusi sector konstruksi sebesar 26,65%, sector perdagangan besar dan eceran sebesar 21,96%, serta sector informasi dan komunikasi sebesar 14,86%. Sementara itu dari aspek pertumbuhannya tahun 2021 untuk sector konstruksi adalah 0,69%, sector perdagangan besar dan eceran 5,75%, dan sector informasi dan komunikasi sebesar 7,68%. Proporsi dan pertumbuhan ketiga sector tersebut cukup besar dan menopang lebih dari 50% PDRB Surakarta.

Sebagian besar sector menunjukkan penurunan nilai PDRB di tahun 2020 namun Kembali meningkat di tahun 2021. Sektor ekonomi yang pada periode 2020-2021 menunjukkan kenaikan dari sisi proporsi dan nilai PDRB adalah sector industri pengolahan, sektor pengadaan listrik dan gas, sektor perdagangan, sektor transportasi dan pergudangan, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, serta sektor jasa keuangan dan asuransi. Sektor industri pengolahan menunjukkan kinerja yang sangat baik, proporsi sektor ini terhadap PDRB dari yang semula 8,44% di tahun 2020 naik menjadi 8,66% di tahun 2021.

Situasi dan kondisi perekonomian nasional mendorong kinerja sektor ini semakin baik. Dihitung dari sisi pertumbuhan sectoral menggunakan PDRB ADHK, pertumbuhan sektor industri pengolahan dari yang sebesar semula -4,01% di tahun 2020 naik tajam menjadi 6,13% di tahun 2021. Hal yang mirip juga terjadi pada sektor perdagangan dari -5,18% menjadi 5,75%, sektor transportasi dari -62,54% menjadi 3,46%, serta sektor penyediaan akomodasi dan makan minum dari -16,20% menjadi 8,43%.

Situasi ini menggambarkan bahwa tahun 2021 merupakan tahun titik balik bangkitnya perekonomian Kota Surakarta. Meski demikian, kondisi yang terjadi di tahun 2021 belum dapat dikatakan sebagai kondisi yang *established*, karena masih rentan terhadap gejolak internal dan eksternal. Tahun 2021 lebih tepat sebagai tahun pemulihan, sehingga berbagai upaya dan strategi pada tahun 2022 akan berpengaruh terhadap kondisi Kota Surakarta Tahun 2023.

Tabel

Proporsi (ADHB) dan Pertumbuhan PDRB Kota Surakarta (ADHK)  
Tahun 2012-2021

Lapangan Usaha	Proporsi (ADHB)				Pertumbuhan (ADHK)				2020-2021		Tren 2012-2021	
	2012	2019	2020	2021	2012	2019	2020	2021	Proporsi	Pertumbuhan	Proporsi	Pertumbuhan
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,51	0,49	0,51	0,50	2,40	2,96	1,93	2,14	Turun	Naik	Turun	Turun

B. Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,42	-64,49	-6,15	-14,77	Turun	Turun	Turun	Turun
C. Industri Pengolahan	8,27	8,46	8,44	8,66	7,35	5,88	-4,01	6,13	Naik	Naik	Naik	Turun
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,22	0,20	0,20	0,21	12,55	5,21	1,59	6,85	Naik	Naik	Turun	Turun
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,19	0,14	0,16	0,14	-2,54	4,74	3,22	-4,30	Turun	Turun	Turun	Turun
F. Konstruksi	26,99	27,10	27,04	26,65	5,45	4,61	-1,97	0,69	Turun	Naik	Turun	Turun
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	23,34	22,16	21,64	21,96	2,06	5,18	-5,18	5,75	Naik	Naik	Turun	Naik
H. Transportasi dan Pergudangan	2,42	2,59	1,03	1,04	6,44	7,32	-62,54	3,46	Naik	Naik	Turun	Turun
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,36	5,41	4,55	4,72	7,82	5,21	-16,20	8,43	Naik	Naik	Turun	Naik
J. Informasi dan Komunikasi	11,23	12,01	14,55	14,86	11,81	10,12	19,70	7,68	Naik	Turun	Naik	Turun
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	3,71	3,76	3,90	3,91	2,98	4,44	2,13	2,28	Naik	Naik	Naik	Turun
L. Real Estate	4,09	3,85	3,97	3,92	7,07	2,98	0,43	3,42	Turun	Naik	Turun	Turun
M,N. Jasa Perusahaan	0,69	0,86	0,81	0,80	7,18	9,53	-8,53	2,19	Turun	Naik	Naik	Turun
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,17	5,41	5,39	5,11	1,66	3,90	-2,15	-0,19	Turun	Naik	Turun	Turun
P. Jasa Pendidikan	4,87	5,51	5,65	5,44	10,56	5,98	-0,96	0,13	Turun	Naik	Naik	Turun
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,01	1,12	1,31	1,26	7,49	6,19	12,11	1,22	Turun	Turun	Naik	Turun
R,S,T,U. Jasa Lainnya	0,95	0,95	0,85	0,81	4,35	7,44	-14,32	0,07	Turun	Naik	Turun	Turun
Produk Domestik Regional Bruto	100,00	100,00	100,00	100,00	5,58	5,77	-1,76	4,01				

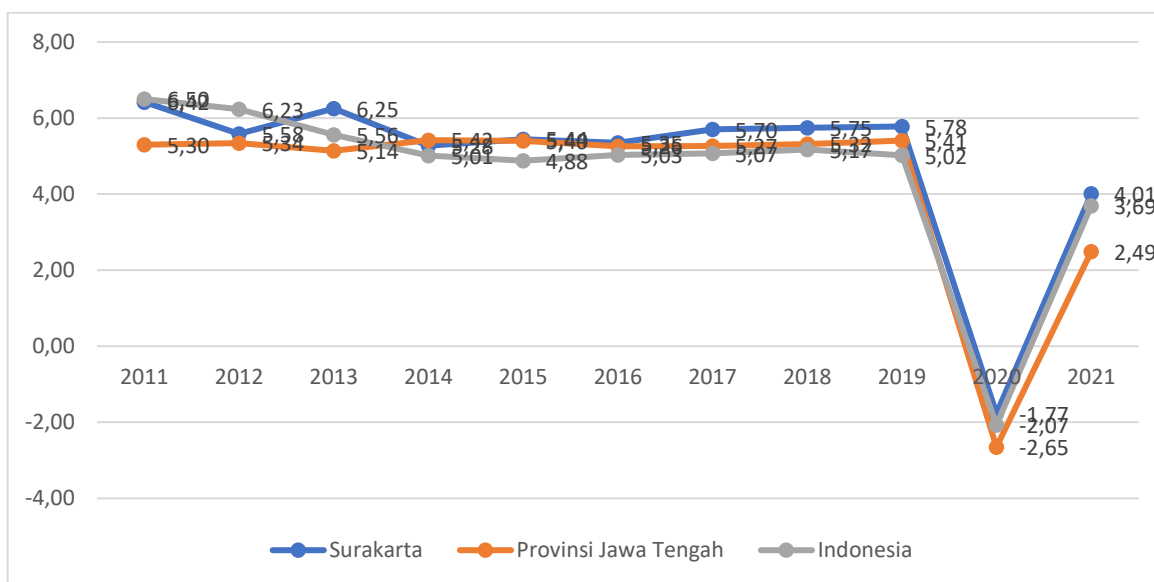
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Surakarta, diolah.

Selama 2011-2021 pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta secara perlahan menunjukkan tren yang menurun meskipun relative kecil. Meskipun tren 2016-2019 terlihat menunjukkan kenaikan, namun tren 2011-2016 menunjukkan penurunan. Tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kembali meningkat menjadi 4,01% dari yang sebelumnya -1,76% di tahun 2020. Dengan demikian tantangan di tahun 2022 dan 2023 akan menjadi cukup besar untuk mengembalikan posisi pertumbuhan ekonomi seperti periode-periode sebelumnya.

Posisi Kota Surakarta sebagai salah satu kota wisata dan budaya, perdagangan, pendidikan, dan industri membuat cukup rentan terhadap guncangan factor eksternal, terlebih posisi geografis Kota Surakarta yang strategis. Pemantapan pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan melalui sektor yang dominan dalam struktur PDRB serta rentan terhadap gejolak

yang terjadi di luar Kota Surakarta, terlebih apabila perdagangan dan industri masih tergantung dari daerah lain sehingga posisi Kota Surakarta masih merupakan *net importir*.

Grafik  
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi  
Kota Surakarta, Provinsi Jateng, dan Nasional, 2011-2021



Sumber: BPS dan BPS Kota Surakarta, diolah

Pola pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta selama 2011-2021 memiliki kemiripan dengan pola pertumbuhan Provinsi Jawa Tengah dan nasional. Hal ini semakin mengindikasikan bahwa gejolak perekonomian nasional akan berpengaruh terhadap kondisi Kota Surakarta.

Bila ditinjau dari sisi pengeluaran, PDRB Kota Surakarta didominasi oleh pembentukan modal tetap bruto (PMTB) serta konsumsi rumah tangga. Selama 2011-2021 rata-rata konsumsi rumah tangga berada di kisaran 50,08% sementara PMTB sebesar 67,43%. Dari sisi pengeluaran besarnya proporsi PMTB mengindikasikan dinamika investasi yang cukup kuat sehingga factor investasi sangat penting dalam menunjang

perekonomian Kota Surakarta. Sementara itu konsumsi rumah tangga dipengaruhi oleh factor daya beli masyarakat. Kondisi Kota Surakarta ini sangat berbeda dengan di Provinsi Jawa Tengah, di tahun 2021 proporsi konsumsi Jawa Tengah 60,14% sementara PMTB hanya 31,76%. Tahun 2021 PMTB Kota Surakarta menunjukkan kenaikan proporsi yang cukup besar sementara konsumsi pemerintah dan konsumsi rumah tangga mengalami penurunan. Hal ini semakin menegaskan bahwa sektor swasta di Kota Surakarta di tahun 2021 menunjukkan kebangkitan.

Tabel  
Proporsi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran, 2011-2021 (%)

Komponen Pengeluaran	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	50,77	50,89	51,79	51,99	51,93	50,83	50,75	50,84	50,44	51,53	50,53
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,55	0,56	0,59	0,62	0,60	0,61	0,61	0,63	0,65	0,61	0,61
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	11,70	11,85	12,15	12,13	12,51	11,61	11,46	10,97	10,61	9,59	9,55
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	66,46	66,40	66,38	67,55	66,90	67,64	67,73	70,15	70,57	64,29	67,78
5. Perubahan Inventori	4,06	6,78	4,21	2,54	0,63	0,23	0,35	0,71	0,61	0,63	0,61
6. Net Ekspor	-33,54	-36,48	-35,14	-34,83	-32,58	-30,93	-30,89	-33,30	-32,87	-26,65	-29,08
PDRB Pengeluaran	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kota Surakarta, diolah

Pertumbuhan konsumsi rumah tangga menunjukkan peningkatan dari 0,14% di tahun 2020 menjadi 2,16% di tahun 2021 sementara pertumbuhan konsumsi pemerintah meningkat sangat tajam dari -9,27% di tahun 2020 menjadi 3,66% di tahun 2021. Hal yang sama juga terjadi pada PMTB yang menunjukkan peningkatan sangat tinggi di tahun 2021 sebesar 5,56% dari yang sebelumnya -9,68% di tahun 2020. Dengan demikian dari sisi pengeluaran contributor terbesar pertumbuhan ekonomi 2021 adalah pengeluaran PMTB dan konsumsi masyarakat. Meski pertumbuhan konsumsi pemerintah tinggi namun proporsinya dalam

struktur PDRB jauh lebih kecil dibandingkan PMTB dan konsumsi masyarakat.

Tabel

Pertumbuhan Komponen Pengeluaran PDRB ADHK, 2017-2021 (%)

Komponen Pengeluaran	2017	2018	2019	2020	2021
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	5,10	5,94	4,36	0,14	2,16
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	5,85	8,62	10,01	-9,27	3,66
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	4,04	1,76	3,61	-9,61	3,01
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	6,62	8,88	5,01	-9,68	5,56
5. Perubahan Inventori	1,48	1,32	0,67	87,02	-25,13
6. Net Ekspor	-6,23	-13,06	-0,35	21,41	-2,86
PDRB Pengeluaran	5,70	5,75	5,78	-1,76	4,01

Sumber: BPS Kota Surakarta, diolah

#### 4.2. EFISIENSI PEREKONOMIAN

ICOR merupakan indikator yang menunjukkan perubahan output (PDRB) akibat perubahan investasi. Dengan kata lain, ICOR merupakan salah satu indikator efisiensi ekonomi. Semakin kecil nilai ICOR semakin tinggi tingkat efisiensi perekonomian.

Penghitungan ICOR ada yang menggunakan time lag 0,1, atau 2. Bila menggunakan time lag 0, artinya investasi tahun ini langsung berdampak pada output tahun ini juga. Bila menggunakan time lag 1 misalnya, berarti output tahun ini dihasilkan dari investasi 1 tahun yang lalu. Penggunaan time lag sangat berkaitan dengan karakteristik investasi. Investasi yang sifatnya jangka panjang dengan skala besar, lebih tepat menggunakan ICOR dengan time lag 1 atau 2.

Penghitungan ICOR menggunakan PDRB Berdasarkan Pengeluaran ADHB. Perhitungan ICOR lag 1 menggunakan PDRB ADHB menunjukkan ICOR Kota Surakarta sangat tinggi, namun ketika menggunakan lag 2, nilai ICOR menjadi turun sangat drastic. Hal ini merupakan salah satu indikasi

bahwa karakteristik investasi di Kota Surakarta lebih dominan investasi yang sifatnya jangka panjang. ICOR lag 1 tahun 2020 sebesar -80,31 akibat penurunan PDRB di tahun 2019-2020, dan dengan menggunakan lag-2 nilai ICOR tahun 2020 sebesar 9,59. Di tahun 2021 nilai iCOR lag 1 menunjukkan angka 12,42 yang artinya untuk menghasilkan satu satuan output diperlukan 12,42 satuan input.

Tabel  
ICOR Kota Surakarta 2011-2021

ICOR SURAKARTA	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
LAG 1	6,51	6,97	7,27	7,26	8,05	8,93	8,36	9,21	9,47	-80,31	12,42
LAG 2	-	3,54	3,73	3,84	3,97	4,38	4,50	4,68	4,87	9,59	14,42

Sumber: BPS Kota Surakarta dan Provinsi Jawa Tengah, diolah.

Komponen investasi untuk penghitungan ICOR juga lazim memasukan komponen perubahan inventori. Dengan memasukkan komponen perubahan inventori, nilai ICOR akan lebih tinggi. Bila diperbandingkan dengan ICOR Jawa Tengah dan Nasional, nilai ICOR Kota Surakarta terlihat jauh lebih tinggi. Tingginya nilai ICOR mengindikasikan adanya inefisiensi perekonomian yang bisa disebabkan banyak hal seperti kualitas SDM, masalah birokrasi dan perizinan, masalah jenis atau karakteristik investasi, masalah biaya logistic, dan sebagainya.

Tabel  
Perbandingan ICOR Kota Surakarta vs Provinsi vs Nasional

ICOR-PMTB	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Surakarta	3,54	3,73	3,84	3,97	4,38	4,50	4,68	4,87	9,59	14,42
Jawa Tengah	1,73	1,76	1,63	1,71	2,03	2,27	2,28	2,37	5,26	7,73
Indonesia	1,61	1,81	1,76	1,89	2,21	2,12	1,97	2,28	8,17	4,59
ICOR-PMTB & PERUB. INVENTORI	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Surakarta	3,90	3,97	3,99	4,01	4,41	4,53	4,73	4,91	9,68	14,54

Jawa Tengah	2,14	2,06	1,80	1,78	2,07	2,33	2,38	2,43	5,42	7,93
Indonesia	1,73	1,92	1,87	1,96	2,29	2,22	2,10	2,38	8,33	4,69

Sumber: BPS Kota Surakarta dan Provinsi Jawa Tengah, diolah.

Kinerja ICOR sektoral diukur dengan menggunakan ICOR lag 1. Berdasarkan hasil perhitungan, tahun 2021 sektor pengadaan listrik dan gas memiliki ICOR positif yang terkecil yaitu 6,71 dan kemudian sektor penyediaan akomodasi, makan dan minum dengan ICOR 7,33. Nilai ICOR positif terbesar adalah administrasi pemerintahan yaitu 277,84, yang dipengaruhi oleh karakteristik sektor tersebut sebagai sektor pelayanan public.

Tabel  
ICOR Sektoral Kota Surakarta, 2011-2021

Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
A.Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,88	8,95	4,33	10,62	8,16	9,88	16,01	10,79	11,82	14,38	18,19
B.Pertambangan dan Penggalian	-48,73	-1117,48	38,37	4,64	6,97	62,27	26,67	430,67	-1,19	-24,65	-5,25
C.Industri Pengolahan	4,09	5,63	6,23	5,20	9,54	8,55	9,79	10,20	9,39	-60,79	8,35
D.Pengadaan Listrik dan Gas	8,40	6,37	28,73	24,01	9,61	5,11	6,26	9,19	13,58	60,14	6,71
E.Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	18,58	-34,24	86,58	12,31	14,09	17,67	10,44	15,41	12,24	6,88	-15,67
F.Konstruksi	11,11	7,10	9,06	6,49	7,66	8,62	9,23	7,81	9,69	-63,79	16,94
G.Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,21	13,08	6,70	10,88	9,16	9,39	9,02	10,43	9,44	-20,61	9,79
H.Transportasi dan Pergudangan	14,20	9,96	6,33	4,49	5,80	12,13	10,01	11,47	8,03	-1,06	10,60
I.Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,29	3,87	5,25	5,66	7,04	7,71	13,30	15,26	11,75	-3,86	7,33
J.Informasi dan Komunikasi	8,18	6,32	9,30	9,46	9,62	11,56	4,22	6,27	6,80	3,16	8,92
K.Jasa Keuangan dan Asuransi	6,31	6,09	8,37	7,35	6,29	6,38	7,79	10,80	12,87	22,32	11,96
L.Real Estate	7,46	8,67	11,94	5,76	6,77	8,64	9,50	14,63	15,72	26,47	16,11
M,N.Jasa Perusahaan	4,17	5,73	4,86	5,81	4,53	5,58	9,13	6,30	6,79	-10,03	19,68
O.Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	15,29	6,09	8,35	11,38	6,98	9,07	16,15	16,51	13,93	-61,38	277,84
P.Jasa Pendidikan	2,15	3,37	3,78	5,73	8,83	9,61	6,92	8,57	8,49	37,68	36,74
Q.Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,69	3,52	6,32	4,44	6,44	8,98	8,12	7,56	10,48	3,91	34,27
R,S,T,U.Jasa Lainnya	11,18	13,32	7,87	6,34	10,83	6,84	8,33	9,70	9,35	-5,37	73,39

Tahun 2021 investasi di Kota Surakarta mencapai 153 milyar untuk PMDN dan hanya 1,65 milyar untuk PMA. Nilai investasi Kota Surakarta ini hanya 0,5% dari total investasi di Jawa Tengah dan serapan tenaga kerja juga sangat kecil dibandingkan dengan jumlah proyek yang ada.

Tabel  
Perkembangan Realisasi Investasi Kota Surakarta

Wilayah	PMDN			PMA		
	Jumlah Proyek	Nilai (Juta Rp)	TKI	Jumlah Proyek	Nilai (Juta Rp)	TKI
Surakarta	1367	153.236,40	2487	96	1.651	35
Jawa Tengah	18184	31.311.180,80	86117	3141	1.820.243.90	133492

Sumber: Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka, diolah.

#### 4.3. SEKTOR EKONOMI POTENSIAL

Analisis LQ merupakan analisis untuk melihat keunggulan suatu sektor atau subsektor secara relatif dibandingkan dengan wilayah yang lebih luas, seperti Kota Surakarta dengan Provinsi Jawa Tengah. Pada dasarnya analisis ini untuk melihat posisi suatu sektor atau subsektor tertentu diantara sektor atau subsektor yang sama di seluruh wilayah. Implikasi lain adalah untuk melihat kemampuan suatu sektor atau subsektor untuk memenuhi kebutuhan internal wilayah. Analisis LQ dapat dilakukan melalui dua metode, yaitu Static LQ (SLQ) serta Dynamic LQ (DLQ). Dinamic LQ menggunakan dasar pertumbuhan sektoral.

Jika LQ lebih besar dari 1, sektor tersebut merupakan sektor basis, artinya tingkat spesialisasi Kota Surakarta lebih tinggi dari tingkat provinsi, Jika LQ lebih kecil dari 1, merupakan sektor non basis, yaitu sektor yang tingkat spesialisasinya lebih rendah dari tingkat provinsi, Jika LQ sama dengan 1, berarti tingkat spesialisasi Kota Surakarta sama dengan tingkat provinsi. Nilai DLQ yang dihasilkan dapat diartikan sebagai berikut: jika  $DLQ > 1$ , maka potensi perkembangan sektor i di Kota Surakarta lebih cepat dibandingkan sektor yang sama di provinsi. Namun, jika  $DLQ < 1$ , maka

potensi perkembangan sektor i di Kota Surakarta lebih rendah dibandingkan provinsi secara keseluruhan. Gabungan antara nilai SLQ dan DLQ dijadikan kriteria dalam menentukan apakah sektor ekonomi tersebut tergolong unggulan, prospektif, andalan, dan tertinggal.

<b>Kriteria</b>	<b>DLQ &gt; 1</b>	<b>DLQ &lt; 1</b>
SLQ > 1	Unggulan	Prospektif
SLQ < 1	Andalan	Tertinggal

Berdasarkan nilai LQ, pada tahun 2021 terdapat cukup banyak sector yang memiliki LQ di bawah 1, yaitu sector pertanian; sector pertambangan dan penggalian; sector industry pengolahan; sector transportasi dan pergudangan; serta sector jasa lainnya. Kecilnya nilai LQ tersebut mengindikasikan bahwa usaha-usaha di sector-sektor tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan internal Kota Surakarta, sehingga harus didatangkan dari wilayah lain. Selain itu, nilai LQ < 1 atas beberapa sector tersebut juga mengindikasikan bahwa sector-sektor tersebut bukan sector yang masuk dalam kelompok terspesialisasi di Surakarta. Meski mungkin di Kota Surakarta sector-sektor tersebut memiliki kontribusi penting, namun di tingkat provinsi sector-sektor tersebut tergolong kecil. Pada tahun 2020 saat Pandemi Covid serta tahun 2021 pasca Pandemi Covid, sector yang memiliki nilai LQ di bawah 1 belum mengalami perubahan, namun nilai LQ dari 2020-2021 mengalami perubahan. Misalnya sector pengadaan listrik dan gas menunjukkan sedikit kenaikan namun sector pengadaan air menunjukkan penurunan. Meski demikian kenaikan atau penurunan nilai LQ tersebut relative kecil.

Dari sisi Dynamic LQ (DLQ), pada tahun 2021 terdapat cukup banyak sector yang memiliki nilai DLQ di atas satu, lebih banyak dibandingkan

dengan tahun 2020. Sektor yang menunjukkan kenaikan DLQ dari di bawah 1 menjadi di atas 1 adalah sektor pertanian, sektor industri pengolahan, sektor pengadaan listrik dan gas, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, sektor jasa keuangan dan asuransi, serta sektor real estate. Sektor yang menunjukkan penurunan DLQ dari sebelumnya di atas 1 menjadi lebih kecil dari 1 adalah sektor pengadaan air dan sektor konstruksi.

Nilai LQ yang lebih kecil dari 1 namun memiliki nilai DLQ yang lebih besar dari 1 mengindikasikan bahwa sector tersebut dalam konteks provinsi tidak menonjol, namun perubahan atau pertumbuhan sector tersebut termasuk sangat menonjol dalam level provinsi. Tahun 2021 cukup banyak sektor yang memiliki nilai SLQ dan DLQ yang keduanya lebih besar dari 1 sebagai salah satu indikasi bahwa perekonomian di Kota Surakarta sudah mulai bergerak positif.

Bila dikaitkan dengan proporsi suatu sektor terhadap PDRB, nilai LQ yang di bawah satu mengindikasikan bahwa peran sektor dalam pembentukan PDRB Surakarta tergolong besar sehingga sangat mendorong perekonomian Surakarta, namun sebenarnya sector tersebut bila dibandingkan dengan sector sejenis di provinsi Jawa Tengah masih sangat kurang.

Nilai LQ sector penyediaan akomodasi pada tahun 2021 adalah 1,351 sedangkan sektor perdagangan adalah 1,538. Hal ini salah satu indikasi bahwa Kota Surakarta memiliki keunggulan sebagai kota wisata, bisnis, dan perdagangan. Nilai LQ tertinggi adalah sector informasi dan komunikasi yang pada tahun 2020 mencapai 3,047 dan tahun 2021 naik menjadi 3,074.

Dari perhitungan nilai LQ tersebut dapat disimpulkan bahwa perekonomian Surakarta memiliki keunggulan di hampir semua sector,

kecuali sektor pertanian, sector pertambangan dan penggalian, sector industry pengolahan, sector transportasi dan pergudangan, serta sector jasa lainnya.

Tabel  
Nilai LQ dan Dynamic LQ Kota Surakarta 2017-2021

LAPANGAN USAHA	2017		2018		2019		2020		2021	
	SLQ	DLQ	SLQ	DLQ	SLQ	DLQ	SLQ	DLQ	SLQ	DLQ
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,033	1,015	0,033	1,009	0,033	1,012	0,033	0,986	0,033	1,007
B. Pertambangan dan Penggalian	0,001	0,944	0,000	0,368	0,000	0,890	0,000	0,937	0,000	0,811
C. Industri Pengolahan	0,224	0,996	0,223	0,996	0,224	1,004	0,221	0,989	0,228	1,030
D. Pengadaan Listrik dan Gas	2,083	0,987	2,067	0,992	2,053	0,994	2,031	0,989	<b>2,034</b>	<b>1,002</b>
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,416	0,994	2,401	0,993	<b>2,400</b>	<b>1,000</b>	<b>2,400</b>	<b>1,000</b>	2,156	0,898
F. Konstruksi	2,516	0,978	2,480	0,986	2,462	0,993	2,485	1,009	2,316	0,932
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,624	0,994	1,604	0,988	1,586	0,989	1,549	0,977	1,538	0,993
H. Transportasi dan Pergudangan	0,858	0,990	0,840	0,979	0,828	0,985	0,454	0,549	0,452	0,995
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,598	0,977	1,532	0,959	1,472	0,961	1,329	0,902	<b>1,351</b>	<b>1,017</b>
J. Informasi dan Komunikasi	3,044	0,972	3,023	0,993	2,971	0,983	<b>3,047</b>	<b>1,026</b>	<b>3,074</b>	<b>1,009</b>
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	1,248	0,994	1,240	0,994	<b>1,246</b>	<b>1,005</b>	1,234	0,991	<b>1,234</b>	<b>1,000</b>
L. Real Estat	2,340	0,983	2,263	0,967	2,199	0,972	2,195	0,998	<b>2,207</b>	<b>1,006</b>
M,N. Jasa Perusahaan	2,010	0,957	1,994	0,992	1,968	0,987	1,922	0,977	1,893	0,985
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,036	0,983	2,016	0,990	2,012	0,998	1,978	0,983	1,974	0,998
P. Jasa Pendidikan	1,117	0,975	1,092	0,978	1,072	0,981	1,054	0,984	1,048	0,994
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,230	0,984	1,225	0,996	1,214	0,991	<b>1,246</b>	<b>1,027</b>	<b>1,251</b>	<b>1,004</b>
R,S,T,U. Jasa Lainnya	0,601	0,978	0,585	0,975	0,575	0,982	0,530	0,923	0,524	0,989
Produk Domestik Regional Bruto	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

Sumber: BPS Kota Surakarta dan Provinsi Jawa Tengah, diolah.

Berdasarkan nilai LQ dan DLQ dapat dipetakan sektor perekonomian yang masuk dalam kategori unggulan, prospektif, andalan dan tertinggal. Pemetaan sektor-sektor tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Pemetaan tersebut didasarkan pada posisi relative Kota Surakarta dalam konteks Provinsi Jawa Tengah.

Tabel  
Overlay LQ dan DLQ Sektor Ekonomi Kota Surakarta Tahun 2021

Kriteria	DLQ > 1	DLQ < 1
<b>LQ &gt; 1</b>	<b>Unggulan</b>	<b>Prospektif</b>
	Sektor : 1. Pengadaan Listrik dan Gas 2. Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum 3. Informasi dan Komunikasi 4. Jasa Keuangan dan Asuransi 5. Real Estat 6. Jasa Perusahaan 7. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Sektor : 1. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 2. Perdagangan Besar dan Eceran 3. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 4. Konstruksi 5. Jasa Pendidikan
<b>LQ &lt; 1</b>	<b>Andalan</b>	<b>Tertinggal</b>
	Sektor : 1. Industri Pengolahan 2. Pertanian	Sektor : 1. Pertambangan dan Penggalian 2. Jasa Lainnya 3. Transportasi dan Pergudangan

Dari tinjauan shift-share, perhitungan shift share dilakukan pada periode 2017-2021 yang diaksudkan untuk mengetahui dampak perekonomian dalam wilayah dan luar wilayah terhadap Kota Surakarta. Berdasarkan hal tersebut pada periode 2017-2021 terlihat nilai *national share* (Nij) positif pada semua sektor dengan total nilai 3.671.679 juta. Hal ini berarti kondisi perekonomian Provinsi Jawa Tengah membawa dampak positif terhadap perekonomian Kota Surakarta dan memberikan kontribusi sebesar 3,67 triliun. Sementara itu nilai *regional share* (Mij) untuk semua sektor tidak semuanya positif. Sektor dengan nilai Mij negative adalah sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, sektor transportasi dan pergudangan, sektor jasa keuangan dan asuransi, serta sektor jasa lainnya. Sektor-sektor yang memiliki nilai

Mij negative tersebut mengindikasikan bahwa kondisi perekonomian di wilayah Kota Surakarta menyebabkan terjadinya kontraksi sektor-sektor tersebut. Meski demikian secara keseluruhan nilai Mij adalah positif yaitu 2.036.222 juta yang berarti kondisi perekonomian Kota Surakarta selama 2017-2021 mampu memberikan kontribusi terhadap perekonomian sebesar 2,036 trilyun.

Dengan demikian pengaruh perekonomian provinsi dan struktur perekonomian Kota Surakarta dalam pembentukan PDRB Kota Surakarta cukup besar, namun dampak perekonomian provinsi masih lebih besar dibandingkan dengan kondisi di dalam Kota Surakarta. Nilai Cij menggambarkan daya saing suatu sektor di Kota Surakarta terhadap sektor sejenis di Provinsi Jawa Tengah. Secara keseluruhan, nilai Cij Kota Surakarta selama 2017-2021 bernilai negative yaitu -1.182.133 yang berarti lemahnya daya saing sector-sektor di Kota Surakarta memberikan efek negative dalam PDRB. Sektor dengan nilai Cij terbesar adalah Sektor Konstruksi yaitu -545.872.

Tabel  
Shift-Share 2017-2021

LAPANGAN USAHA	Nij	Mij	Cij	D
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	15816	-5816	5702	15702
Pertambangan dan Penggalian	62	-10	-434	-382
Industri Pengolahan	283950	-90420	113819	307350
Pengadaan Listrik dan Gas	8356	5966	28	14351
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6236	3727	-5510	4453
Konstruksi	958740	284520	-545872	697388
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	861327	185116	-252196	794247
Transportasi dan Pergudangan	105322	-273457	-341189	-509325
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	186079	54366	-247202	-6757
Informasi dan Komunikasi	506244	1846534	230161	2582939
Jasa Keuangan dan Asuransi	126853	-2742	15506	139617

Real Estate	162030	26806	-53545	135292
Jasa Perusahaan	27226	9832	-9675	27382
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	194921	-106563	-12194	76164
Jasa Pendidikan	154551	55379	-60478	149452
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	38029	46833	17158	102020
Jasa lainnya	35935	-3848	-36210	-4123
<b>PDRB</b>	<b>3671679</b>	<b>2036222</b>	<b>-1182133</b>	<b>4525768</b>

Sumber: BPS Kota Surakarta dan Provinsi Jawa Tengah, diolah.

Bila periode shift share dipecah menjadi 2 periode yaitu 2017-2019 dan 2019-2021, maka akan terlihat bahwa pada periode 2019-2021 kontribusi dari situasi Provinsi Jawa Tengah (Nij) menurun dibandingkan periode 2017-2019, namun kondisi perekonomian Kota Surakarta (Mij) menunjukkan peningkatan. Secara keseluruhan, selama 2019-2021 situasi dan kondisi perekonomian Jawa Tengah, Kota Surakarta, serta daya saing produk menunjukkan kontribusi yang menurun tajam dari 3.755.627 juta di periode 2017-2019, menjadi 770.141 juta pada periode 2019-2021.

Tabel  
Perbandingan Shift Share Kota Surakarta 2017-2019 dan 2019-2021

LAPANGAN USAHA	Nij			Mij			Cij			D		
	2017-2019	2019-2021	+/-	2017-2019	2019-2021	+/-	2017-2019	2019-2021	+/-	2017-2019	2019-2021	+/-
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	14930,47	855,21	-14075,261	-9514,84	3867,56	13382,401	4279,74	1283,61	-2996,13	9695,37	6006,38	-3688,99
Pertambangan dan Penggalian	58,06	1,09	-56,971846	-26,75	5,53	32,285935	-376,55	-43,75	332,80591	-345,25	-37,13	308,12
Industri Pengolahan	268046,84	15837,92	-252208,93	-32341,12	-58344,85	-26003,725	21140,26	93010,49	71870,232	256845,98	50503,56	-206342,42
Pengadaan Listrik dan Gas	7887,97	465,96	-7422,0149	139,97	5789,88	5649,91	-489,21	555,99	1045,2049	7538,73	6811,83	-726,90
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5887,10	345,08	-5542,0151	-806,87	4545,01	5351,8772	87,98	-5605,57	-5693,552	5168,21	-715,48	-5883,69
Konstruksi	905043,18	53170,96	-851872,22	31500,56	249501,94	218001,37	-121414,15	-420414,86	-299000,7	815129,59	-117741,96	-932871,55
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	813086,04	48001,28	-765084,76	84637,27	98475,97	13838,693	-125627,84	-124325,62	1302,2177	772095,47	22151,62	-749943,85
Transportasi dan Pergudangan	99422,72	6030,94	-93391,775	52161,85	-316833,32	-368995,18	-29580,09	-320526,78	-290946,7	122004,48	-631329,16	-753333,64
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	175657,43	10295,05	-165362,38	112770,98	-54872,56	-167643,53	-134455,21	-116153,12	18302,085	153973,20	-160730,63	-314703,83
Informasi dan Komunikasi	477890,42	31553,04	-446337,38	633975,62	1189640,71	555665,08	-87086,91	336965,68	424052,59	1024779,13	1558159,43	533380,30
Jasa Keuangan dan Asuransi	119748,63	6912,46	-112836,18	-40880,18	38638,75	79518,931	8004,16	7192,88	-811,274	86872,61	52744,09	-34128,52
Real Estate	152955,48	8638,15	-144317,33	6758,27	18962,71	12204,438	-81427,11	29404,38	110831,49	78286,64	57005,24	-21281,40
Jasa Perusahaan	25701,05	1641,94	-24059,102	23700,71	-13825,89	-37526,598	-3687,65	-6147,77	-2460,12	45714,11	-18331,71	-64045,82
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	184004,22	10532,81	-173471,42	-59208,20	-46840,01	12368,192	-6485,57	-5839,21	646,35728	118310,46	-42146,41	-160456,87
Jasa Pendidikan	145894,74	8749,46	-137145,29	66639,46	-11268,64	-77908,092	-50674,52	-9888,69	40785,828	161859,68	-12407,87	-174267,55
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	35899,47	2217,81	-33681,659	16984,34	29596,01	12611,672	-1965,17	19287,84	21253,007	50918,64	51101,66	183,02
Jasa lainnya	33921,97	2087,84	-31834,128	26000,29	-28934,58	-54934,868	-13142,11	-24056,13	-10914,02	46780,15	-50902,87	-97683,02
<b>PDRB</b>	<b>3466035,79</b>	<b>207336,99</b>	<b>-3258698,8</b>	<b>912491,36</b>	<b>1108104,23</b>	<b>195612,87</b>	<b>-622899,95</b>	<b>-545300,63</b>	<b>77599,323</b>	<b>3755627,20</b>	<b>770140,59</b>	<b>-2985486,61</b>

Sumber: BPS Kota Surakarta dan Provinsi Jawa Tengah, diolah

Perhitungan shift-share dinamis memberikan gambaran apakah suatu sector atau subsektor terspesialisasi atau tidak, serta apakah suatu sector atau subsektor memiliki daya saing atau tidak bila dibandingkan dengan sector atau subsektor yang sama di Jawa Tengah. Nilai efek spesialisasi yang negative menggambarkan bahwa sector atau subsektor tersebut bukan merupakan sector yang terspesialisasi di Surakarta. Hal ini mengindikasikan bahwa sector tersebut belum menjadi sector yang **“leading”** dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Tengah. Demikian pula dengan nilai efek kompetitif yang negatif memberikan gambaran bahwa sector tersebut memiliki daya saing yang lebih rendah dibandingkan sector sejenis di Jawa Tengah. Dengan demikian, ada kemungkinan suatu sector merupakan sector yang terspesialisasi di Surakarta, namun daya saingnya rendah (nilai positif kecil) atau bahkan tidak memiliki daya saing (nilai negatif). Sebaliknya, ada kemungkinan suatu sector bukan merupakan sector yang terspesialisasi di Surakarta, namun memiliki daya saing bila dibandingkan dengan sector sejenis di wilayah Jawa Tengah. Sector yang unggul merupakan sector yang memiliki efek spesialisasi dan efek kompetitif yang keduanya positif.

Sektor industry pengolahan misalnya, selama periode 2017-2021 merupakan sector yang berdaya saing di tingkat provinsi karena memiliki nilai efek kompetitif yang positif meskipun kecil, namun dalam konteks provinsi tersebut, sector ini bukan merupakan sector yang menjadi spesialisasi di Kota Surakarta. Untuk sector konstruksi misalnya, pada periode 2017-2021 sector tersebut menjadi sector spesialisasi di Kota Surakarta, namun dalam konteks provinsi sector tersebut tidak kompetitif. Sector yang memiliki nilai positif pada efek spesialisasi maupun efek kompetitif hanya ada dua, yaitu sector pengadaan air serta sector jasa keuangan dan asuransi. Sector yang memiliki kedua efek negative adalah sector pertambangan dan penggalian, sector transportasi dan pergudangan, serta sector jasa lainnya.

Tabel  
 Nilai Shift Share Dinamis 2017-2021

LAPANGAN USAHA	Efek Spesialisasi	Efek Kompetitif	Efek Alokasi	Efek Spesialisasi	Efek Kompetitif	Efek Alokasi
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-4.062.838	0,03136	-127393	-	+	-
Pertambangan dan Penggalian	-721.153	-0,70949	511649	-	-	+
Industri Pengolahan	-8.496.201	0,00863	-73299	-	+	-
Pengadaan Listrik dan Gas	37.488	-0,00678	-254	+	-	-
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	31.547	0,00163	52	+	+	+
Konstruksi	4.985.014	-0,01467	-73154	+	-	-
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.854.917	-0,01690	-48252	+	-	-
Transportasi dan Pergudangan	-149.972	-0,03255	4881	-	-	+
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	600.732	-0,08373	-50300	+	-	-
Informasi dan Komunikasi	2.933.431	-0,01993	-58475	+	-	-
Jasa Keuangan dan Asuransi	217.266	0,00731	1589	+	+	+
Real Estate	800.656	-0,05823	-46625	+	-	-
Jasa Perusahaan	118.077	-0,01570	-1853	+	-	-
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	855.914	-0,00386	-3300	+	-	-
Jasa Pendidikan	139.886	-0,03799	-5315	+	-	-
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	61.380	-0,00599	-368	+	-	-
Jasa lainnya	-206.146	-0,04238	8736	-	-	+

Sumber: BPS Kota Surakarta dan Provinsi Jawa Tengah, diolah.

Dari sisi kredit perbankan, tahun 2021 total kredit perbankan yang disalurkan adalah 29,1 trilyun; sedikit menurun dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 31,2 trilyun. Proporsi terbesar kredit perbankan adalah sektor industri manufaktur sebesar 33,17% pada tahun 2021. Selain itu sektor perdagangan juga memiliki proporsi kredit perbankan yang besar yaitu 21,55%. Bila rasio PDRB terhadap kredit perbankan dihitung, maka rasio industri pengolahan tahun 2021 adalah 0,45 yang berarti setiap Rp1 kredit untuk sektor ini memberikan nilai output Rp0,45. Untuk sektor perdagangan, nilai rasionya adalah 1,76 dan nilai rasio terbesar adalah sektor jasa keuangan dan asuransi sebesar 15,65.

Tabel  
Rasio PDRB Terhadap Kredit Perbankan

PROPORSI KREDIT PERBANKAN (%)					
LAPANGAN USAHA	2017	2018	2019	2020	2021
Pertanian, Perburuan dan Kehutanan, Perikanan	2,99	2,94	3,28	2,46	2,63
Pertambangan dan Penggalian	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02
Industri Pengolahan	29,18	29,97	30,37	34,13	33,17
Listrik, gas dan air	0,05	0,09	0,02	0,06	0,33
Konstruksi	8,29	9,98	11,42	10,19	11,55
Perdagangan Besar dan Eceran	25,88	24,42	24,54	23,19	21,55
Transportasi, pergudangan dan komunikasi	0,60	0,68	0,72	0,81	0,48
Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	5,46	6,54	6,41	6,00	5,79
Perantara Keuangan	0,36	0,65	0,37	0,43	0,43
Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	4,48	3,28	2,67	3,17	3,55
Admistrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,00	0,00	0,01	-	-
Jasa Pendidikan	0,77	0,83	0,72	0,72	0,67
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,42	0,63	1,02	0,93	0,87
Jasa Lainnya	21,50	19,97	18,42	17,91	18,96
All	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
RASIO PDRB TERHADAP KREDIT					
LAPANGAN USAHA	2017	2018	2019	2020	2021
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,27	0,26	0,23	0,32	0,33
B. Pertambangan dan Penggalian	0,47	0,15	0,04	0,05	0,04
C. Industri Pengolahan	0,48	0,44	0,43	0,38	0,45
D. Pengadaan Listrik dan Gas	6,01	3,40	14,37	5,23	1,10
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-	-	-	-	-
F. Konstruksi	5,30	4,22	3,64	4,04	3,99
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,42	1,41	1,38	1,42	1,76
H. Transportasi dan Pergudangan	7,08	5,86	5,55	1,95	3,74
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,70	1,30	1,30	1,16	1,41
J. Informasi dan Komunikasi	-	-	-	-	-
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	17,75	9,16	15,44	13,95	15,65

L. Real Estate dan Jasa Perusahaan	1,79	2,23	2,60	2,24	2,23
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	18.964,90	2.416,31	1.418,47	-	-
P. Jasa Pendidikan	11,54	10,19	11,72	11,95	14,00
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,33	2,75	1,67	2,15	2,52
R,S,T,U. Jasa Lainnya	0,07	0,07	0,08	0,07	0,07
Produk Domestik Regional Bruto	1,64	1,55	1,53	1,52	1,73

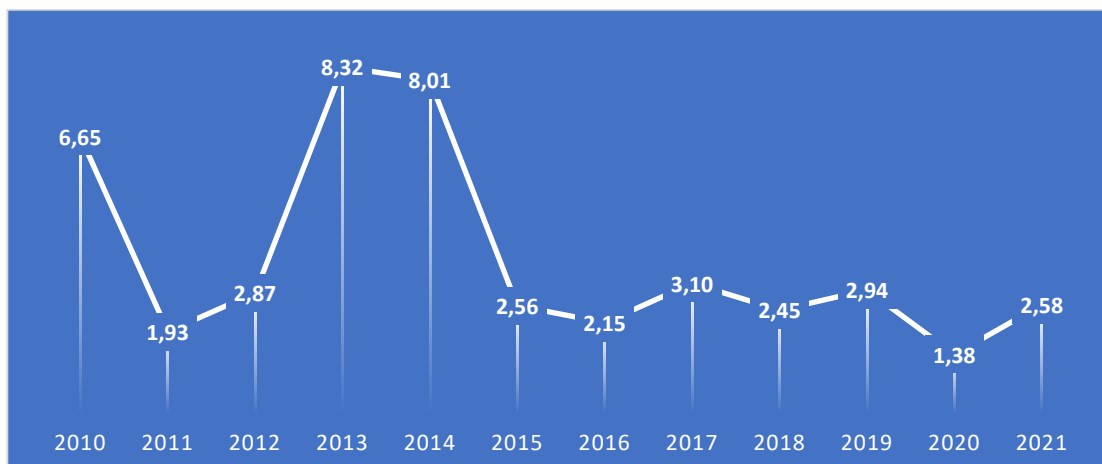
Sumber: OJK Kota Surakarta dan BPS Kota Surakarta, diolah

#### 4.4. INFLASI

Sepanjang 2010-2021 inflasi di Surakarta terlihat berfluktuasi. Selama periode tersebut inflasi terendah terjadi pada tahun 2011 yang mencapai hanya 1,93% dan yang tertinggi adalah tahun 2013 yang mencapai 8,32%. Penurunan inflasi yang sangat tajam terjadi pada tahun 2015, yaitu dari 8,01% di tahun 2014 menjadi 2,56% di tahun 2015. Inflasi tahun 2019 tercatat sebesar 2,94% dan angka ini naik bila dibandingkan dengan tahun 2018 yang besarnya 2,45%. Pada tahun 2021 inflasi tercatat sebesar 2,58%; naik cukup tajam dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 1,38%.

#### Grafik

Perkembangan Laju Inflasi 2010-2021



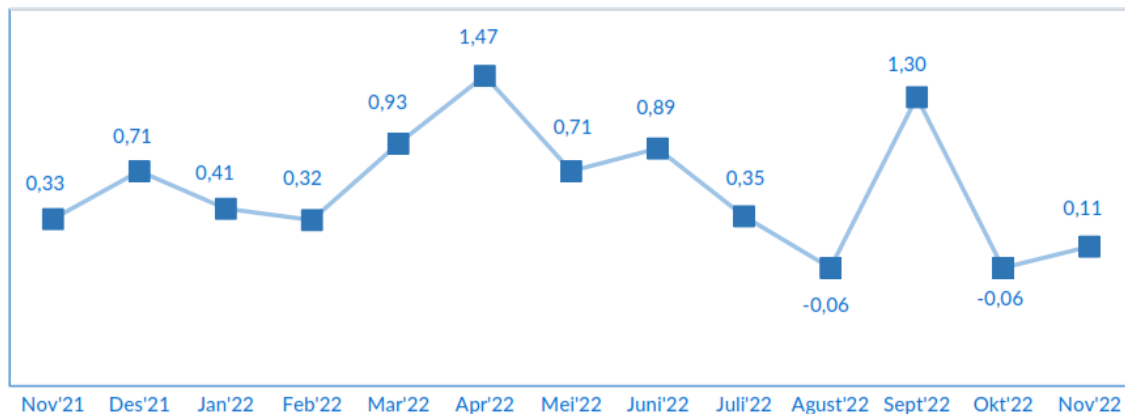
Sumber: BPS Kota Surakarta, diolah

Sepanjang tahun 2021, inflasi tertinggi terjadi pada bulan Desember 2021 sebesar 0,71% dan terendah terjadi pada bulan Juni yang justru terjadi deflasi sebesar -0,22%. Pola inflasi Kota Surakarta adalah mengalami puncaknya di awal/akhir tahun serta menunjukkan pola menurun di pertengahan tahun.

Bulan November 2022 inflasi Kota Surakarta adalah 0,11%, naik cukup tajam dari bulan Oktober 2022 yang sempat mengalami deflasi sebesar -0,06%.

### Grafik

Inflasi November 2021 s.d. November 2022



Sumber: BPS Kota Surakarta

Dari 11 kelompok pengeluaran konsumsi, berdasarkan IHK terdapat 9 kelompok pengeluaran mengalami kenaikan yaitu : kelompok makanan, minuman dan tembakau naik 0,02%, kelompok pakaian dan alas kaki naik 0,51%, kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga naik 0,01%, kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga naik 0,18%, kelompok kesehatan naik 0,09%, kelompok transportasi naik 0,24%, kelompok rekreasi, olah raga dan budaya naik

0,47%, kelompok penyediaan makanan, minuman/restoran naik 0,08% dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya naik 0,37%. Sebaliknya kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan turun 0,23% sedangkan kelompok pendidikan relatif stabil.

Komoditas yang mengalami kenaikan harga sehingga memberikan sumbangan inflasi diantaranya: telur ayam ras, rokok kretek filter, tarif angkutan udara, bayam, bandeng diawetkan dan ongkos binatu/laundry. Sebaliknya komoditas yang mengalami penurunan harga sehingga memberikan sumbangan deflasi antara lain: cabai rawit, cabai merah, daging ayam ras, bawang putih, bawang merah dan telepon seluler.

Berdasarkan perhitungan tahun kalender (Januari s.d. November 2022), kelompok transportasi menunjukkan kenaikan tertinggi yaitu 16,46% dan disusul kemudian kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 11,63%. Kelompok rekreasi, olah raga, dan budaya mengalami inflasi tahun kalender sebesar 7,49%. Dilihat dari jenis kelompok barang dan jasa, hal ini mengindikasikan bahwa sektor pariwisata telah berkembang, terlebih dengan adanya berbagai event yang ada pada bulan-bulan sebelumnya. Perkembangan sektor pariwisata ini memicu peningkatan pengeluaran untuk makanan dan minuman serta transportasi.

Tabel  
Inflasi Tahun 2020-2022

Kelompok Barang dan Jasa	Inflasi (%)		Nov 2022
	2020	2021	
Umum	1,38	2,58	6,53
Makanan, minuman, dan tembakau	1,51	3,22	4,36
Pakaian dan alas kaki	2,6	0,70	3,65
Perumahan, air, listrik, bahan bakar rumah tangga	1,07	2,08	3,09
Perlengkapan, peralatan, pemeliharaan rutin ruma tangga	0,39	2,69	6,45
Kesehatan	3,76	12,93	5,00
Transportasi	-0,52	1,16	16,46
Informasi, komunikasi, jasa keuangan	-0,09	0,31	-0,33

Rekreasi, olah raga, budaya	1,05	3,12	7,49
Pendidikan	-2,16	5,35	2,97
Peyediaan makanan dan minuman/restoran	5,37	1,26	11,63
Perawatan pribadi dan jasa lainnya	2,22	2,65	8,71

Sumber: BPS Kota Surakarta, diolah

Bila inflasi dilihat secara sektoral, maka inflasi dapat dihitung dengan menggunakan pendekatan PDRB deflator, yaitu perbandingan PDRB harga berlaku dengan harga konstan. PDRB deflator memiliki perbedaan dengan Indeks Harga Konsumen (IHK). PDRB deflator mengukur semua harga barang dan jasa yang dihasilkan atau diproduksi sementara IHK hanya mengukur harga barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen. Selain itu, PDRB deflator hanya mengukur barang dan jasa yang dihasilkan di dalam negeri. PDRB deflator mengukur perubahan harga secara umum sementara IHK mengukur perubahan harga untuk kelompok barang tertentu.

Berdasarkan pendekatan ini inflasi di Surakarta tahun 2021 adalah 1,70%. Sektor yang memiliki tingkat inflasi cukup besar pada tahun 2021 adalah sektor jasa keuangan dan asuransi (3,63%), sektor pengadaan air dan gas (3,59%), serta sektor konstruksi (3,52%). Sektor yang menunjukkan terjadinya deflasi adalah sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang yaitu -0,29%.

Tabel  
Perbandingan Inflasi Sektoral 2012-2021

Lapangan Usaha	2012	2017	2020	2021	Standar Deviasi
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,66	0,66	2,46	1,76	2,94
B. Pertambangan dan Penggalian	0,36	3,12	3,80	1,30	5,85
C. Industri Pengolahan	5,30	2,92	3,09	2,32	1,46
D. Pengadaan Listrik dan Gas	-0,91	7,00	-0,52	3,59	3,66
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,40	0,62	5,86	-0,29	1,79
F. Konstruksi	4,64	2,52	0,99	3,52	1,71

G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,48	2,22	2,20	1,49	0,64
H. Transportasi dan Pergudangan	0,87	1,45	5,62	3,19	2,23
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10,34	0,99	-0,41	1,25	3,31
J. Informasi dan Komunikasi	-0,19	5,99	0,43	0,34	1,84
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	8,81	4,07	0,71	3,63	2,17
L. Real Estate	1,30	2,34	1,97	1,00	1,45
M,N. Jasa Perusahaan	5,25	3,33	2,38	1,43	1,65
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	10,23	3,20	1,14	0,45	2,75
P. Jasa Pendidikan	10,17	5,48	2,68	1,82	3,12
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	12,44	1,52	3,76	0,86	3,34
R,S,T,U. Jasa Lainnya	1,11	1,57	2,86	0,91	1,95
Produk Domestik Regional Bruto	4,68	2,80	0,99	1,70	1,15

Sumber: BPS Kota Surakarta dan Provinsi Jawa Tengah, diolah.

## **4.5. ASPEK KESEJAHTERAAN DAN SOSIAL**

### **4.5.1. PDRB PERKAPITA**

PDRB atas dasar harga konstan merupakan PDRB riil dan bila dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun, akan menghasilkan informasi PDRB perkapita riil. Sementara itu PDRB atas dasar harga berlaku apabila dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun akan menghasilkan PDRB Perkapita nominal. Jumlah penduduk didasarkan pada data BPS Kota Surakarta. PDRB perkapita merupakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat yang menggambarkan pendapatan per orang per tahun. Berdasarkan perhitungan PDRB ADHK dan ADHB, selama 2011-2021 PDRB perkapita Kota Surakarta menunjukkan tren yang terus meningkat. Tahun 2021 PDRB perkapita ADHB sebesar Rp96,4 juta dan ADHK sebesar Rp69,3 juta. Secara nominal, PDRB perkapita tahun 2021 naik sebesar 5,69% sementara secara riil naik sebesar 3,93%.

Tahun 2020 sempat terjadi penurunan PDRB perkapita akibat dampak pandemi Covid-19. Terdampaknya perekonomian Kota Surakarta tersebut membuat perekonomian tertekan dan di saat yang sama hasil

Sensus Penduduk 2020 menunjukkan adanya kenaikan jumlah penduduk Kota Surakarta. PDRB perkapita ADHK tahun 2020 turun sebesar -2,26% dari Rp68,2 juta menjadi Rp66,6 juta. Bila dihitung menggunakan PDRB ADHB, tingkat penurunan tahun 2020 adalah -1,03%.

Tabel

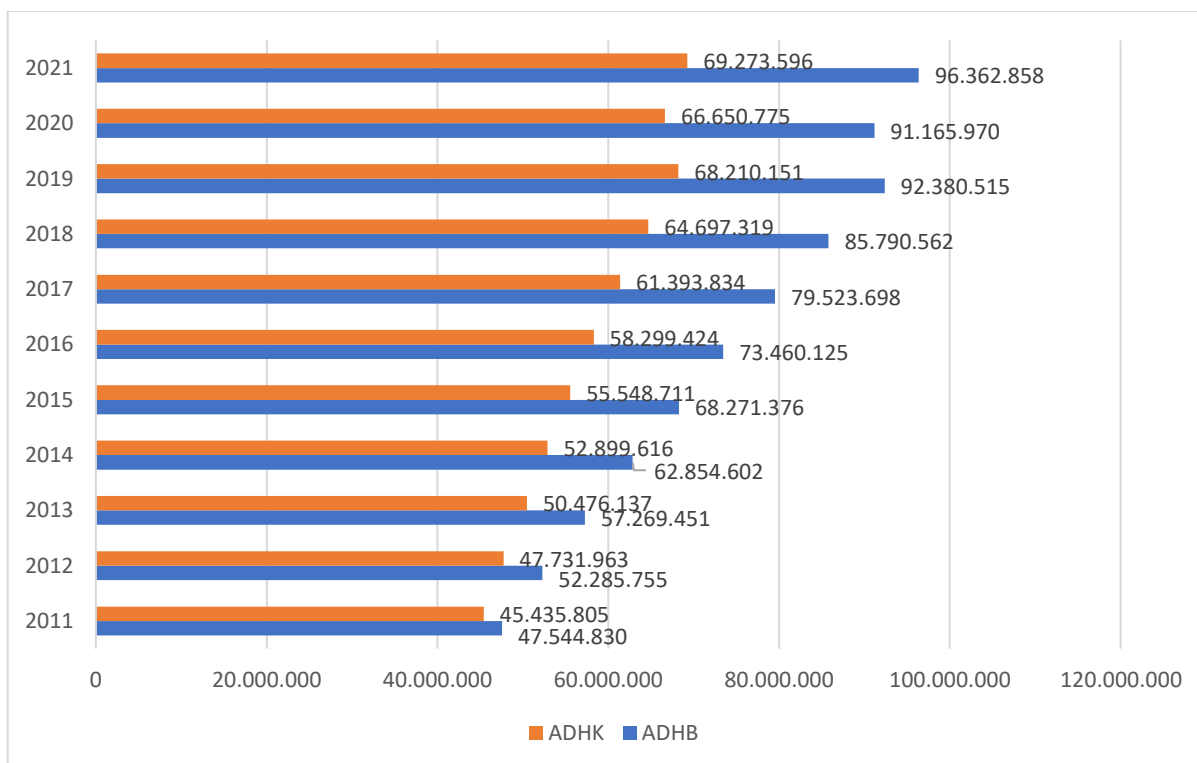
PDRB Perkapita Kota Surakarta 2011-2021

PDRB	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
ADHB	47.544.830	52.285.755	57.269.451	62.854.602	68.271.376	73.460.125	79.523.698	85.790.562	92.380.515	91.165.970	96.362.858
ADHK	45.435.805	47.731.963	50.476.137	52.899.616	55.548.711	58.299.424	61.393.834	64.697.319	68.210.151	66.650.775	69.273.596

Sumber: BPS Kota Surakarta dan Provinsi Jawa Tengah, diolah

Grafik

Perkembangan PDRB Perkapita ADHB dan ADHK Tahun 2011-2021



PDRB perkapita yang terjadi di tahun 2020 tersebut mengalami penurunan yang cukup tajam bila dibandingkan dengan tahun 2019.

Pertumbuhan PDRB perkapita ADHK dari 5,43% di tahun 2019 menjadi -2,29% di tahun 2020 sama artinya dengan terjadi penurunan PDRB ADHK sebesar -7,72%, namun di tahun 2021 terjadi kenaikan yang sangat tajam sebesar 7,01%. Keberhasilan ini mengindikasikan keberhasilan pemerintah kota dalam mengelola perekonomian daerah.

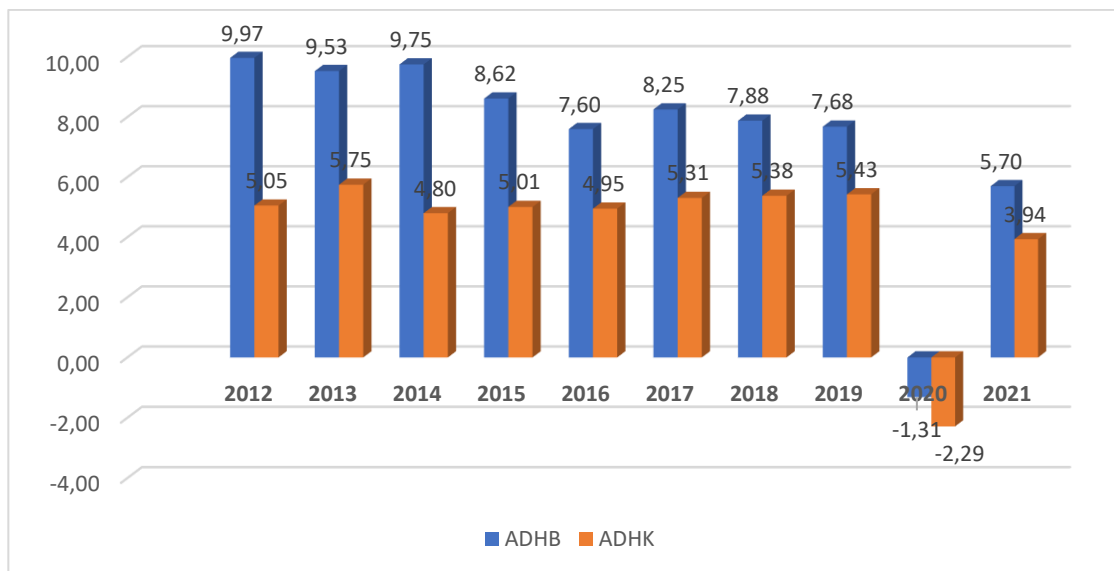
Tabel  
 Pertumbuhan PDRB Perkapita Kota Surakarta 2012-2021

PDRB	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
ADHB	9,97	9,53	9,75	8,62	7,60	8,25	7,88	7,68	-1,31	5,70
ADHK	5,05	5,75	4,80	5,01	4,95	5,31	5,38	5,43	-2,29	3,94

Sumber: BPS Kota Surakarta dan Provinsi Jawa Tengah, diolah

Grafik

Pertumbuhan PDRB Perkapita ADHB dan ADHK Tahun 2012-2021



Sumber: BPS Kota Surakarta dan Provinsi Jawa Tengah, diolah

#### 4.5.2. TINGKAT KEMISKINAN

Kemiskinan merupakan kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak yang menggunakan batas garis kemiskinan (*poverty line*). Dalam kemiskinan, terdapat tiga ukuran yang

dipergunakan, yaitu tingkat kemiskinan, indeks kedalaman kemiskinan, dan indeks keparahan kemiskinan. Tingkat kemiskinan Surakarta selama 2011-2019 terlihat menunjukkan tren penurunan dari 12,92% di tahun 2011 menjadi 9,08% di tahun 2018 dan di tahun 2019 tingkat kemiskinan kembali turun 8,70%, namun tingkat kemiskinan Kembali menunjukkan kenaikan selama 2019-2021. Di tahun 2020 tingkat kemiskinan menjadi 9,03% dan 2021 naik lagi menjadi 9,40%. Hal ini disebabkan oleh jumlah penduduk miskin mengalami kenaikan selama 2019-2021 sementara kenaikan jumlah penduduk secara keseluruhan tidak sebesar kenaikan jumlah penduduk miskin. Kenaikan jumlah penduduk miskin disebabkan karena penurunan bahkan hilangnya penghasilan akibat situasi pandemic Covid 19 sementara garis kemiskinan sebagai batas antara kelompok miskin dan tidak miskin di tahun 2020 dan 2021 menunjukkan kenaikan.

Dalam hal tingkat kedalaman kemiskinan, pada tahun 2021 Kota Surakarta memiliki nilai indeks kedalaman kemiskinan atau P1 sebesar 1,83 sedangkan nilai indeks keparahan kemiskinan atau P2 sebesar 0,54, naik dibandingkan dengan tahun 2020. Indeks P1 menunjukkan besarnya pengeluaran penduduk terhadap garis kemiskinan, sehingga kenaikan angka P1 tersebut menggambarkan banyaknya kelompok miskin baru yang sebelumnya di atas garis kemiskinan, dan rata-rata pengeluaran penduduk miskin berada lebih jauh dari bawah garis kemiskinan. Hal yang sama juga terjadi pada indeks P2 yang di tahun 2021 yang naik dibandingkan tahun 2020 sebagai akibat adanya kelompok miskin yang baru.

Tabel  
Indikator Kemiskinan Surakarta 2011-2021

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Penduduk Miskin (ribuan)	64,50	60,70	59,70	55,92	55,71	55,91	54,89	46,99	45,20	47,03	48,78
Tingkat Kemiskinan	12,92	12,00	11,74	10,95	10,89	10,88	10,65	9,08	8,70	9,03	9,40
Indeks Kedalaman Kemiskinan=P1	1.89	1.33	1.63	1.48	1.74	1.34	1.87	1.47	1.60	1,51	1,83

Indeks Keparahan Kemiskinan=P2	0,46	0,28	0,34	0,30	0,40	0,35	0,44	0,35	0,48	0,38	0,54
Garis Kemiskinan	326.233	361.517	371.918	385.467	406.840	430.293	448.062	464.063	473.516	487.445	511.216

Sumber: BPS Kota Surakarta dan Provinsi Jawa Tengah, diolah

Bila dikaitkan dengan PDRB ADHK, selama periode 2010-2020 pola antara PDRB dengan jumlah penduduk miskin memiliki karakteristik berbanding terbalik, yang berarti semakin tinggi PDRB semakin berkurang jumlah penduduk miskin. Nilai koefisien korelasi keduanya adalah  $r=0,96$  dengan nilai koefisien determinasi disesuaikan ( $r^2$  adjusted)=0,92. Hal ini berarti kenaikan PDRB di Surakarta membawa dampak pada penurunan jumlah penduduk miskin. Bila PDRB ADHK naik sebesar 5% (perekonomian tumbuh sebesar 5%) dari 34.827.188 (jutaan) menjadi 36.568.547 (jutaan), maka ditaksir jumlah penduduk miskin akan turun dari 47.030 menjadi 44.060, namun di tahun 2021 jumlah penduduk miskin justru menunjukkan penambahan yang cukup besar dari 47.030 menjadi 48.780. Hal ini mengindikasikan adanya permasalahan dalam hal distribusi pendapatan antar penduduk, yang disebabkan oleh berbagai hal.

Dengan demikian permasalahan penduduk miskin yang pada akhirnya tidak cukup dilakukan hanya melalui pertumbuhan ekonomi. Secara teoritis pertumbuhan ekonomi akan membawa dampak pada pengurangan tingkat kemiskinan, namun perlu kebijakan yang mampu mendukung mekanisme transmisi terhadap pemberdayaan penduduk miskin.

#### **4.5.3. KETENGAKERJAAN DAN TINGKAT PENGANGGURAN**

Penduduk usia kerja terdiri dari angkatan dan bukan angkatan kerja, dan angkatan kerja sendiri terdiri dari penduduk yang bekerja dan pengangguran terbuka. Pada tahun 2021 jumlah angkatan kerja di Kota Surakarta adalah 282.178 dengan jumlah pengangguran sebanyak 22.153. Angka angkatan kerja menurun cukup tajam dibandingkan tahun 2020

dengan jumlah angkatan kerja sebanyak 288.959 dan jumlah pengangguran 22.877. Dengan data tersebut maka tingkat pengangguran Kota Surakarta tahun 2021 mencapai 7,85%; menurun dibandingkan tahun 2020 yang mencapai menjadi 7,92%. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi mampu menekan angka pengangguran, namun tidak mampu menekan angka kemiskinan.

Tingkat kesempatan kerja, yaitu perbandingan antara penduduk yang bekerja dengan angkatan kerja, selama 2011-2019 menunjukkan tren peningkatan namun di tahun 2020 terjadi penurunan menjadi 92,08% dan tahun 2021 kembali meningkat menjadi 92,58%. Penurunan kesempatan kerja juga terjadi pada periode 2012-2013 yang berarti tingkat pengangguran mengalami kenaikan.

Tabel  
Indikator Ketenagakerjaan Kota Surakarta 2011-2021

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Angkatan Kerja (orang)	263.562	278.535	287.511	275.191	284.076	n.a.	271.527	271.375	286.811	288.959	282.178
Jumlah Pengangguran (orang)	20.295	17.513	20.763	16.957	12.877	n.a.	12.133	11.910	12.003	22.877	22.153
Tingkat Kesempatan Kerja (%)	92,30	93,71	92,78	93,84	95,47	n.a.	95,53	95,61	95,82	92,08	92,15
Tingkat Pengangguran (%)	7,70	6,29	7,22	6,16	4,53	7,55	4,47	4,39	4,18	7,92	7,85
TPAK	67,22	70,43	72,10	68,48	70,12	n.a.	66,10	65,62	68,93	68,84	66,89

Sumber: BPS Kota Surakarta dan Provinsi Jawa Tengah, diolah.

Berdasarkan data 2020-2021 tingkat pengangguran tertinggi pada tahun 2020 adalah lulusan SMP/ sederajat yang mencapai 8,65%. Di tahun 2021, tingkat pengangguran tertinggi adalah mereka yang berpendidikan tertinggi hingga SD, yang mencapai 12,12%. Tingkat pengangguran lulusan perguruan tinggi selama 2020-2021 menurun sangat tajam dari 7,14% di tahun 2020 menjadi 2,50% di tahun 2021.

Tabel  
Pengangguran Kota Surakarta Berdasarkan Pendidikan Tahun 2020-2021

Pendidikan Tertinggi	Pengangguran Terbuka		Angkatan Kerja		Tingkat Pengangguran (%)	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
≤ SD	3.590	6,517	53.330	53.783	6,73	12,12
SLTP	4.307	5.121	49.788	45.579	8,65	11,24
SLTA	10.751	9.082	126.577	125.422	8,49	7,24
Perguruan Tinggi	4.229	1.433	59.264	57.394	7,14	2,50
<b>Jumlah</b>	<b>22.877</b>	<b>22.153</b>	<b>288.959</b>	<b>282.178</b>	<b>7,92</b>	<b>7,85</b>

Sumber: Kota Surakarta Dalam Angka 2021 dan 2022, diolah

Dari aspek jenis kelaminnya, di tahun 2020 tingkat pengangguran perempuan lebih besar dibandingkan dengan laki-laki. Pada tahun 2020 tingkat pengangguran laki-laki adalah 7,52% dan perempuan 8,50%. Di tahun 2021 tingkat pengangguran laki-laki naik menjadi 8,20% sedangkan perempuan turun menjadi 7,41%.

Tabel

Pengangguran Kota Surakarta Berdasarkan Jenis Kelamin

Tahun 2020-2021

Pendidikan Tertinggi	Pengangguran Terbuka		Angkatan Kerja		Tingkat Pengangguran (%)	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Laki-laki	12068	13007	160547	158706	7,52	8,20
Perempuan	10909	9146	128412	123472	8,50	7,41

Sumber: Kota Surakarta Dalam Angka 2021 dan 2022, diolah

Penduduk yang bekerja sebagian besar bekerja pada sektor industri pengolahan, perdagangan, serta penyediaan akomodasi dan makan minum. Bila dikaitkan dengan PDRB, rasio sektor industri pengolahan tahun 2021 tergolong kecil yaitu 68,76 yang berarti setiap penduduk yang bekerja di sektor industri pengolahan rata-rata menghasilkan nilai output 68,76 juta sementara sektor perdagangan adalah 159,83 dan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 66,79. Angka rasio ini

juga mengindikasikan intensitas penggunaan teknologi dan alat bantu (peralatan) dalam proses produksi.

Tabel  
Rasio Penduduk Bekerja Terhadap PDRB

LAPANGAN USAHA	PENDUDUK YANG BEKERJA				RASIO PDRB TERHADAP PENDUDUK BEKERJA			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
A Pertanian, Kehutanan & Perikanan	1.988	1.311	2.573	2.830	110,30	178,05	94,75	89,54
B Pertambangan & Penggalian	523	351	-	334	1,53	0,82	-	0,73
C Industri Pengolahan	58.163	61.514	67.182	63.445	64,56	66,00	59,80	68,76
D Pengadaan Listrik dan Gas	363	353	185		246,41	267,61	516,05	-
E Treatment Air, Treatment Air Limbah, Treatment & Pemulihan	1.535	216	-	1.264	42,05	317,42	-	56,56
F Konstruksi	9.513	12.931	11.220	11.367	1.267,73	1.006,03	1.147,85	1.180,95
G Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi & Perawatan Mobil	75.318	77.205	69.338	69.206	130,66	137,76	148,64	159,83
H Pengangkutan & Pergudangan	15.100	13.437	14.161	15.683	75,08	92,38	34,68	33,44
I Penyediaan Akomodasi & Penyediaan Makan Minum	30.627	38.190	37.648	35.622	79,62	68,00	57,57	66,79
J Informasi & Komunikasi	3.234	4.073	2.409	3.433	1.602,65	1.415,28	2.876,58	2.180,86
K Aktivitas Keuangan & Asuransi	7.362	7.712	6.616	3.880	231,51	234,09	280,67	507,28
L Real Estat	733	636	619	1.087	2.402,27	2.902,89	3.054,50	1.816,83
M,N Jasa Profesional & Perusahaan	7.507	8.293	5.675	6.785	49,61	49,95	68,35	59,25
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Waj	6.899	6.256	6.244	4.884	356,55	414,70	411,18	527,04
P Pendidikan	12.847	15.484	12.020	11.895	188,83	170,74	223,67	230,43
Q Aktivitas Kesehatan Manusia & Aktivitas Sosial	3.327	5.537	6.147	8.559	150,01	96,69	101,31	74,28
R,S,T,U Jasa Lainnya	27.151	23.731	24.045	19.751	15,55	19,24	16,74	20,58
Total	262.190	277.230	266.082	260.025	169,46	173,14	178,97	193,72

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan BPS Kota Surakarta, diolah

Dari aspek jumlah unit usaha dan penyerapan tenaga kerja, pada tahun 2021 jumlah unit usaha di Kota Surakarta mengalami penurunan dari 7.514 menjadi 7.319. Penurunan unit usaha dialami oleh semua sektor, untuk sektor informal mengalami penurunan dari 6.010 menjadi 5.710. Penurunan unit usaha tersebut diikuti oleh penurunan jumlah

tenaga kerja yang terserap dari 46.418 menjadi 44.596, dan untuk sektor industri kreatif serapan tenaga kerja justru menunjukkan peningkatan dari 164 di tahun 2020 menjadi 941 di tahun 2021.

Secara keseluruhan penurunan serapan tenaga kerja lebih kecil dibandingkan penurunan serapan tenaga kerja. Rata-rata tiap unit usaha mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 6 orang, dan tingkat penyerapan terbesar adalah unit usaha industri besar dengan angka 124 s.d. 127 selama 2020-2021.

Tabel  
Jumlah Unit Usaha dan Penyerapan Tenaga Kerja

Sektor Industri	Unit Usaha		Tenaga Kerja		Rasio Tenaga Kerja per Unit Usaha	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
1. Besar	105	100	13391	12435	127,53	124,35
2. Menengah	275	261	7850	7458	28,55	28,57
3. Industri Kecil	960	912	8572	8143	8,93	8,93
4. Industri Kreatif	164	156	164	941	1,00	6,03
5. Non Formal	6010	5710	16441	15619	2,74	2,74
<b>Jumlah</b>	<b>7514</b>	<b>7139</b>	<b>46418</b>	<b>44596</b>	<b>6,18</b>	<b>6,25</b>

Sumber: Kota Surakarta Dalam Angka 2022, diolah

Permasalahan pengangguran merupakan permasalahan yang saat ini menjadi perhatian khusus pemerintah termasuk pemerintah daerah. Pengangguran akan mendorong timbulnya permasalahan social lainnya. Oleh karena itu kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang ditempuh harus diarahkan pada upaya pengurangan tingkat pengangguran. Kenaikan jumlah pengangguran yang lebih besar dibandingkan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja akan mendorong peningkatan tingkat pengangguran, namun bila kenaikan

jumlah angkatan kerja lebih besar dibandingkan dengan kenaikan jumlah pengangguran, maka tingkat pengangguran akan turun.

Bagaimanakah hubungan antara tingkat pengangguran dan pertumbuhan ekonomi? Studi yang pernah dilakukan oleh Bank Indonesia menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berkorelasi negative dengan pengurangan tingkat pengangguran, sehingga pengurangan tingkat pengangguran dapat dilakukan dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Korelasi antara PDRB dengan jumlah pengangguran di Surakarta adalah erat yang ditunjukkan dengan nilai  $r^2$  adjusted sebesar 0,83 dengan koefisien regresi sebesar -0,00042. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi PDRB diikuti akan semakin mengurangi jumlah pengangguran. Meski demikian, kecilnya koefisien regresi menunjukkan bahwa diperlukan kenaikan PDRB yang sangat besar untuk mengurangi jumlah pengangguran. Oleh karena itu, kebijakan dan strategi mengurangi jumlah pengangguran harus dilakukan dengan kebijakan dan strategi yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, misalnya melalui kebijakan alokasi APBD untuk program pemberdayaan masyarakat melalui dinas terkait.

#### **4.5.4. PEMBANGUNAN MANUSIA**

Salah satu indikator social dan kesejahteraan adalah indikator yang merupakan komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang meliputi angka harapan hidup (AHH), harapan lama sekolah (HLS), rata-rata lama sekolah (RLS), serta pengeluaran perkapita. Berdasarkan indikator tersebut, Kota Surakarta memiliki nilai yang lebih tinggi untuk keempat komponen IPM bila dibandingkan dengan rata-rata seluruh daerah di Jawa Tengah, provinsi Jawa Tengah, maupun nasional, namun nilai tersebut lebih rendah bila dibandingkan dengan Kota Semarang dan Kota Salatiga.

Dari sisi besarnya kenaikan selama 2019-2020, komponen HLS Kota Surakarta memiliki kenaikan sebesar 0,32 atau 2,20%

Untuk IPM secara keseluruhan pada periode 2019-2020 Kota Surakarta mengalami kenaikan sebesar 0,35 (tertinggi dibandingkan rata-rata daerah di Jawa Tengah) dari 81,86 menjadi 82,21. Pada komponen pengeluaran perkapita, semua daerah mengalami penurunan selama 2019-2020. Penurunan untuk Kota Surakarta adalah Rp288.000 atau turun sebesar -1,91%. Angka penurunan ini lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata seluruh daerah di Jawa Tengah.

Di tahun 2021 IPM Kota Surakarta meningkat lagi menjadi 82,62; masih menduduki peringkat ke 3 diantara kota-kota di Jawa Tengah, di bawah Kota Salatiga dan Kota Semarang. Meski demikian kenaikan IPM Kota Surakarta selama 2020-2021 tergolong kecil yaitu 0,5 poin bahkan kenaikan yang terkecil dibandingkan dengan kota-kota lain. Kecilnya kenaikan IPM Kota Surakarta selama 2020-2021 ini disebabkan karena kecilnya kenaikan komponen IPM Kota Surakarta selama 2020-2021. Kenaikan komponen pengeluaran per kapita per orang per tahun meski secara nominal adalah terbesar kedua setelah Kota Semarang, namun secara relative kenaikan tersebut hanya 1,02%. Komponen Rata-rata Lama Sekolah (RLS) juga hanya naik 0,21 poin atau 1,96% dan kenaikan ini adalah yang terkecil dibandingkan dengan kota-kota lain di Jawa Tengah.

Tabel

Komponen IPM Kota Surakarta vs Provinsi vs Nasional Tahun 2019-2021

WILAYAH	UHH (Tahun)			HLS (Tahun)			RLS (Tahun)			Pengeluaran Perkapita (ribuan/orang/tahun)			IPM		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
<b>Kota Surakarta</b>	<b>77,12</b>	<b>77,22</b>	77,32	<b>14,55</b>	<b>14,87</b>	14,88	<b>10,54</b>	<b>10,69</b>	10,9	<b>15.049</b>	<b>14.761</b>	14911	<b>81,86</b>	<b>82,21</b>	82,62
Provinsi Jawa Tengah	74,23	74,37	74,47	12,68	12,70	12,77	7,53	7,69	7,75	11.102	10.930	11034	71,73	71,87	72,16
Indonesia	71,34	71,47	71,57	12,95	12,98	13,08	8,34	8,48	8,54	11.299	11.013	11156	71,92	71,94	72,29
Rata-rata Jawa Tengah	74,78	74,91	75,01	12,85	12,92	12,97	7,76	7,89	7,98	11.217	11.018	11139	72,39	72,51	72,85
Rata-rata Kota di Jawa Tengah	76,16	76,28	76,38	14,18	14,31	14,32	9,80	9,92	10,15	14.165	13.897	14045	79,45	79,57	80,02

Sumber: BPS dan BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah.

Tabel  
Perubahan Komponen IPM Tahun 2020-2021

WILAYAH	UHH		HLS		RLS		Pengeluaran Perkapita (ribuan/orang/tahun)		IPM	
	(+/-)	(%)	(+/-)	(%)	(+/-)	(%)	(+/-)	(%)	(+/-)	(%)
<i>Kota Surakarta</i>	<i>0,10</i>	<i>0,13</i>	<i>0,01</i>	<i>0,07</i>	<i>0,21</i>	<i>1,96</i>	<i>150</i>	<i>1,02</i>	<i>0,41</i>	<i>0,50</i>
Provinsi Jawa Tengah	0,14	0,19	0,07	0,55	0,06	0,78	104	0,95	0,29	0,40
Indonesia	0,13	0,18	0,10	0,77	0,06	0,71	143	1,30	0,35	0,49
Rata-rata Jawa Tengah	0,13	0,17	0,05	0,41	0,09	1,13	121	1,10	0,34	0,47
Rata-rata Kota di Jawa Tengah	0,12	0,16	0,01	0,08	0,23	2,30	148	1,07	0,45	0,56

Sumber: BPS dan BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah.

#### 4.6. PROYEKSI INDIKATOR MAKROEKONOMI

Proyeksi makroekonomi Kota Surakarta dimaksudkan untuk melihat gambaran kondisi tahun 2023 berdasarkan data eksisting tahun-tahun sebelumnya. Metode atau alat proyeksi suatu indikator tertentu bisa berbeda dengan indikator lainnya mengingat karakteristik dan fluktuasi antar indikator yang berbeda-beda pula.

Proyeksi yang dilakukan menggunakan beberapa asumsi makroekonomi baik nasional maupun regional sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2023 diperkirakan 4,6% s.d. 5,2% sesuai dengan proyeksi Bank Indonesia dan IMF.
2. Inflasi Jawa Tengah diasumsikan sebesar 6% sesuai prakiraan Bappeda Provinsi Jawa Tengah
3. Harga BBM, gas, dan tarif dasar listrik tahun 2023 tidak mengalami kenaikan.
4. Tidak terdapat shock pada perekonomian Kota Surakarta seperti pandemic atau bencana alam.

5. Proporsi pendapatan transfer serta belanja pemerintah terhadap total pendapatan relative sama atau  $\pm 1\%$ .

Berdasarkan asumsi di atas, maka proyeksi perekonomian Kota Surakarta adalah sebagai berikut:

#### 4.6.1. Pertumbuhan Ekonomi 2023

Tabel  
Skenario Pertumbuhan Ekonomi

	Nasional 2023		Jawa Tengah	
	4,60%	5,2%	5,28%	5,50%
Pertumbuhan Ekonomi Kota Surakarta	4,32	4,96	4,56	4,79
Berdasarkan Growth Rate	4,87			
Berdasarkan Eksponensial	5,06			
<b>PERTUMBUHAN EKONOMI 2023</b>	<b>4,32% s.d. 4,96%</b>			

Pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta dipengaruhi oleh kondisi perekonomian nasional dan Jawa Tengah. Sektor industri, perdagangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, serta sektor transportasi diperkirakan akan tumbuh konsisten di tahun 2023. Investasi diparkirakan akan mengalami kenaikan yang kecil. Pertumbuhan ekonomi juga menghadapi tantangan pada ketidakpastian harga BBM serta harga kebutuhan pokok di tahun 2023 mengingat kebutuhan pokok untuk masyarakat Kota Surakarta masih bersumber dari daerah luar.

Dengan melihat struktur ekonomi serta kondisi eksisting saat ini, pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta diperkirakan berkisar antara 4,32% s.d. 4,96%. Bila dibreakdown ke dalam triwulanan, prakiraan PDRB Kota Surakarta 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel

Proyeksi PDRB Kota Surakarta ADHK 2023

PDRB (Juta Rp)	Q1	Q2	Q3	Q4
Minimal	9.787.227	9.903.558	10.019.889	10.136.220
Maksimal	9.731.247	9.846.912	9.962.578	10.078.243

**5.6.2. Inflasi**

Inflasi merupakan salah satu variable makroekonomi yang bersifat volatile sehingga tidak mudah dalam hal proyeksi. Inflasi bersifat sangat dinamis dan polanya bersifat jangka pendek. Selama 2010-2015 inflasi Kota Surakarta bergerak fluktuatif dan selama 2015-2021 inflasi relative terkendali dalam kisaran 2% s.d. 3%. Pada fluktuasi bulanan, inflasi tinggi terjadi pada pertengahan bulan dan menunjukkan perlambatan saat menuju akhir bulan, namun naik perlahan pada awal bulan. Pada tahun 2022 ini shock perekonomian Kota Surakarta terjadi karena factor kenaikan BBM, bahan kebutuhan pokok sehari-hari, serta listrik dan gas. Hal itu memicu terjadinya kenaikan harga barang-barang lain. Masyarakat akan menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi di sepanjang 2022, sehingga tahun 2023 pola konsumsi akan Kembali berjalan normal.

Proyeksi inflasi Kota Surakarta tahun 2023 dilakukan dengan pendekatan fluktuasi musiman inflasi bulanan. Atas dasar hal tersebut, proyeksi inflasi Kota Surakarta tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel  
Skenario Inflasi Triwulan ke-1 2023

BULAN	SKENARIO 1	SKENARIO 2
Desember	0,43	0,54
Januari	0,25	0,29
Februari	0,42	0,41
Maret	0,11	0,42
TAHUN	SKENARIO 1	SKENARIO 2
2023	2,40	2,09

Inflasi dipengaruhi oleh beberapa factor seperti jumlah uang beredar, biaya produksi, kenaikan upah, kebutuhan pokok dari luar Kota Surakarta, hambatan distribusi barang, belanja pemerintah, demand pull, serta dampak factor shock luar Kota Surakarta. Banyaknya kebutuhan pokok dari luar kota Surakarta dapat berpotensi adanya hamatan dalam distribusi barang, sehingga hal ini diprediksi menjadi factor utama terjadinya inflasi di tahun 2023.

### 5.6.3. Indikator Sosial Kesejahteraan

Dalam proyeksi indikator social kesejahteraan ini beberpa indicator menggunakan beberapa scenario dengan mempertimbangkan fluktuasi data eksisting 10 tahun terakhir. Penduduk miskin di tahun 2023 diprakirakan akan menunjukkan penurunan akibat intervensi pemerintah daerah selama 2022, namun penurunan akan berjalan secara gradual. Kebijakan jarring pengaman social menjadi salah satu pendorong menurunnya jumlah penduduk miskin.

Tabel  
Proyeksi Indikator Makroekonomi Kota Surakarta

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN			PROYEKSI FINAL
		2021	2022	2023	2023
JUMLAH PENDUDUK					
Skenario 1	JIWA	522.728	526.705	528.848	526.930
Skenario 2			524.825	526.930	s.d.
Skenario 3			526.235	528.369	528.848
ANGKATAN KERJA	ORANG	282.178	284.428	286.696	286.696
PENDUDUK MISKIN	RIBUAN ORANG	48,78	47,22	45,70	45,70
PENGANGGURAN TERBUKA	ORANG	22.153	22.115	22.077	
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)					
Skenario 1	%	82,62	83,17	83,63	83,63

Skenario 2			83,07	83,52	s.d.
Skenario 3			83,21	83,68	83,68
TINGKAT PENGANGGURAN	%	7,85	7,78	7,70	7,70
TINGKAT KEMISKINAN					
Skenario 1	%	9,40	8,30	7,98	7,98
Skenario 2			8,33	8,00	s.d. 8,30
PENDAPATAN ASLI DAERAH					
Skenario 1	JUTA RP	560.580	597.977	650.586	650.586
Skenario 2			647.962	748.952	s.d. 748.952

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

#### **5.1. KESIMPULAN**

- Perekonomian Kota Surakarta ditopang oleh empat sektor utama berdasarkan struktur perekonomian yang ada, yaitu: industri pengolahan, konstruksi, perdagangan, informasi dan komunikasi. Alokasi kredit perbankan khususnya untuk sektor industri pengolahan adalah yang terbesar, namun dampak terhadap perekonomian secara relative tidak sebesar alokasi kredit perbankan berdasarkan rasio PDRB terhadap kredit perbankan.
- Kota Surakarta menghadapi potensi empat permasalahan utama yaitu: pengangguran, kemiskinan, inflasi, dan ketimpangan. Potensi pengangguran ini muncul selain karena factor kesempatan kerja juga karena factor social atau budaya masyarakat, sehingga meski investasi menunjukkan kenaikan namun penggunaan tenaga kerja local masih terbatas. Hal ini pada akhirnya berdampak pada aspek kemiskinan.
- Terjadi pergeseran paradigma ketenagakerjaan, masyarakat khususnya kelompok pemuda memiliki kecenderungan bekerja sesuai passion mereka, dan mereka lebih memilih menganggur daripada bekerja tidak sesuai passion mereka. Hal ini menjadi tantangan bagi OPD yang mengelola ketenagakerjaan. Tingkat pengangguran tahun 2021 didominasi oleh lulusan SD dan berjenis kelamin laki-laki
- Pertumbuhan ekonomi belum optimal mengurangi empat permasalahan utama serta belum optimal dalam meningkatkan PAD. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum diikuti dengan penurunan tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan yang signifikan. Salah

satu indikasi penyebabnya adalah tingginya proporsi sektor konstruksi dalam struktur PDRB namun serapan tenaga kerjanya relative kecil. Pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 justru meningkatkan jumlah penduduk miskin dan mengurangi jumlah pengangguran meski relative kecil.

- Pertumbuhan ekonomi diikuti dengan kenaikan inflasi (overheating economy). Kontribusi konsumsi rumah tangga dalam struktur perekonomian cukup tinggi (lebih dari 50%) sementara berbagai barang konsumsi tergantung dari luar Kota Surakarta.
- Rasio PDRB terhadap kredit perbankan untuk sektor utama perekonomian belum optimal (di bawah 1), sehingga peran kredit perbankan dalam menggerakkan perekonomian melalui sektor ekonomi utama belum memberikan dampak signifikan dalam jangka pendek.
- UMKM dan industri kreatif mampu menyerap tenaga kerja yang cukup besar, tahun 2021 mengalami peningkatan yang cukup besar dalam hal penyerapan tenaga kerja.

## **5.2. REKOMENDASI**

- Bappeda melakukan pemetaan program-program OPD di tahun 2023 yang mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas, sehingga program yang ada difokuskan pada aspek yang mampu secara langsung berdampak pada pengurangan: ketimpangan, kemiskinan, pengangguran. Pemetaan dilakukan terhadap banyaknya program, besarnya alokasi anggaran, besarnya outcome, serta rasio anggaran terhadap outcome.
- Upaya Pengendalian inflasi dilakukan melalui:
  - a. Monitoring harga dan ketersediaan kebutuhan pokok dengan membentuk Satgas sehingga informasi kebutuhan pokok dapat dimonitor ketersediannya.
  - b. Melakukan penghitungan atau proyeksi kebutuhan pokok di tahun 2023-2024 serta membandingkan dengan kondisi eksisting yang ada

sehingga dapat diantisipasi pasokan kebutuhan pokok serta kemungkinan hambatan distribusi barang yang mungkin terjadi.

- c. Kerjasama antar daerah dalam pemenuhan kebutuhan pokok khususnya dengan beberapa daerah sekitar, yang dapat dirintis melalui pertemuan dengan pemerintah daerah sekitar sesuai dengan amanat Kementerian Dalam Negeri.
  - d. Edukasi hemat energi pada masyarakat serta edukasi penggunaan produksi dalam negeri, serta edukasi hemat konsumsi (sesuai kebutuhan, bukan keinginan).
  - e. Pengendalian kredit untuk konsumsi
- UMKM dan industry kreatif diberikan kebijakan khusus untuk mengembangkan usaha dan kreativitasnya, karena kemampuan mereka dalam menyerap tenaga kerja serta banyak diminati oleh masyarakat. Hal ini juga menjadi rintisan pengembangan **UMK Naik Kelas** di Kota Surakarta.
  - Perlu dipertimbangkan kebijakan penggunaan tenaga kerja lokal dan sumber daya UMKM (missal produk maupun makanan/minuman) sebagai persyaratan dalam mendapatkan insentif dalam investasi.
  - Pola pendidikan dan pelatihan bagi pengangguran diarahkan pada materi dan fasilitas yang sesuai dengan passion mereka. Pemerintah daerah perlu membangun ekspektasi masyarakat yang positif terhadap permasalahan pengangguran dan kemiskinan.
  - Setiap kecamatan dilibatkan secara aktif dalam mapping UMKM serta pelaku usaha kecil/industry kreatif, serta memberikan fleksibilitas bagi setiap kecamatan untuk menumbuhkembangkan UMKM dan industry kreatif melalui sentra-sentra kegiatan.
  - Perlu dirumuskan kebijakan khusus pendanaan atau akses pemodaln usaha bagi UMKM dan industry kreatif, mengingat cukup banyaknya kasus UMKM dan industry kreatif yang terkendala “BI Checking”.
  - Dalam rangka mendukung aktivitas pariwisata, perlu disusun agenda event atau eksebisi di Kota Surakarta (bekerjasama dengan pihak lain) dalam rangka menguatkan citra Surakarta sebagai kota wisata budaya, kota wisata kuliner,

kota pendidikan sehingga memberikan dampak pada pengembangan UMKM dan industri kreatif.

- Pembangunan pariwisata juga perlu diarahkan untuk mendorong sector wisatawan lebih lama di Kota Surakarta (long stay). Hal ini dapat dilakukan dengan merancang jalur wisata serta Kerjasama dengan Asita.